



**PENGARUH AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI
TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI
DANA DESA DI NAGARI LANSEK KADOK KECAMATAN
RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana S1
Pada Jurusan Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar*

Oleh:

LARA ARYANTI
NIM : 1730403047

**JURUSAN AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BATUSANGKAR
2022 M/1443 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lara Aryanti
NIM : 1730403047
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul **"Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman"** adalah benar karya saya sendiri bukan plagiat, kecuali yang dicantumkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa karya ilmiah ini plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 27 Januari 2022
Saya yang menyatakan



LARA ARYANTI
NIM. 1730403047

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama Lara Aryanti NIM: 1730403047, dengan judul "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman" memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan Sidang Munaqasah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 19 Januari 2022

Ketua Jurusan
Akuntansi Syariah



Yeni Melia, SE. MM
NIP. 198505052015032005

Pembimbing



Nasfizar Gaspandri, SE., M.Si.
NIP.- 197508232003121004

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Batusangkar



Dr. H. Rizal., M. Ag.CRP.
NIP. 197310072002121001

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbilalamin, puji syukur di ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman”**.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menyelesaikan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.

Dalam penulisan skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada ayah **Dt. Asrul Bakir** dan Umak **Suriyanti** yang telah membesarkan, mendidik, menasehati, menuntun dan mendoakan serta memberikan dukungan baik moril maupun materil dengan penuh ketulusan. Semoga pengorbanan beliau diberkahi oleh yang maha kuasa.

Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Marjoni Imamora M.Sc, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
2. Bapak Dr. H. Rizal., M. Ag.CRP® selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
3. Ibu Yeni Melia, SE. MM selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah dan Ibu Atika Amor selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Batusangkar.
4. Ibu Sri Adella Fitri, S.E. M.Si. selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak Nasfizar Guspendri, SE., M.Si. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Ibuk Elfina Yenti, SE. AK., M.Si, CA selaku penguji 1 dan Bapak Revi Candra, S.Pd., M.Ak selaku penguji 2.
7. Bapak Antoni. S, S.Pd selaku Wali Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
8. Bapak dan Ibu Dosen dan Staf IAIN Batusangkar yang telah banyak berbagi ilmu semasa menempuh pendidikan serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam mengurus keperluan kuliah di IAIN Batusangkar.
9. Terimakasih kepada keluarga dan teman-teman yang ikut berperan dalam kehidupan penulis, serta memberikan semangat dan dukungan dalam perjuangan penulis selama menempuh pendidikan.

Semoga pengetahuan, bimbingan, motivasi dan kemudahan yang Bapak, Ibu dan teman-teman berikan menjadi amal ibadah dan di ridai serta mendapat balasan dari Allah SWT, *Aamiin Ya Rabbal'Alamiin*. Penulisan skripsi ini masih memiliki kekurangan, untuk itu diharapkan saran yang akan membangun penulis dalam mengevaluasi diri dikemudian hari. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca nantinya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabaraktuh

Batusangkar, 31 Januari 2022

Penulis



LARA ARYANTI
NIM. 1730403047

ABSTRAK

LARA ARYANTI, NIM. 1730403047. Judul Skripsi: **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman”**. Jurusan Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pemanfaatan akuntabilitas keuangan yang belum maksimal dan dapat menjamin konsistensi pengelolaan dana desa dalam menilai tingkat efektivitas keuangan desa di Nagari Lansek Kadok. Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh akuntabilitas keuangan dan transparansi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan metode kuantitatif, dimana sampel yang digunakan ialah keseluruhan dari populasi (*Total Sampling*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuisioner secara manual. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, dengan pengujian hipotesis uji statistic t dan f.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok, transparansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok, dan secara simultan akuntabilitas dan transparansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Transparansi, dan Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat & Luaran Penelitian.....	7
G. Definisi Operasional	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Akuntabilitas	10
2. Transparansi	15
3. Efektivitas	19
4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa	26
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Berpikir.....	29
D. Hipotesis	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Tempat dan Waktu Penelitian	32
C. Populasi dan Sampel	32
D. Teknik Pengumpulan Data.....	32
E. Pengembangan Instrumen	33

1.	Penyusunan Instrumen Angket	33
2.	Pengujian Instrument Angket.....	34
F.	Teknik Analisis Data.....	37
1.	Analisis Regresi Linear Berganda.....	38
2.	Uji Hipotesis	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		41
A.	Sejarah Perusahaan	41
1.	Gambaran Umum.....	41
2.	Visi dan Misi.....	41
3.	Susunan Organisasi	42
B.	Gambaran Umum Objek Penelitian	47
1.	Pengujian Instrumen Angket.....	47
2.	Deskripsi Responden	56
3.	Deskripsi Variabel Penelitian.....	58
C.	Analisis Data.....	60
1.	Uji Hipotesis	61
D.	Pembahasan.....	65
BAB V PENUTUP.....		69
A.	Kesimpulan	69
B.	Implikasi	69
C.	Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Skor kuisoner	33
Tabel 3. 2 Kisi-kisi Instrumen Penelitian.....	34
Tabel 3. 3 Pedoman Interpretasi Studi Validitas Prediktif.....	34
Tabel 4. 1 Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner	47
Tabel 4. 2 Hasil Uji Validitas Nilai Akuntabilitas	48
Tabel 4. 3 Hasil Uji Validitas Nilai Transparansi	49
Tabel 4. 4 Hasil Uji Validitas Nilai Efektivitas	50
Tabel 4. 5 Hasil Uji Reabilitas Angket Akuntabilitas.....	51
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reabilitas Angket Transparansi.....	51
Tabel 4. 7 Hasil Uji Reabilitas Angket Efektivitas	52
Tabel 4. 8 Hasil Uji Normalitas Nilai Residual	53
Tabel 4. 9 Hasil Uji Multikolinearitas	55
Tabel 4. 10 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	57
Tabel 4. 11 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	57
Tabel 4. 12 Karakteristik Responden Berdasarkan Umur.....	58
Tabel 4. 13 Deskripsi Akuntabilitas.....	58
Tabel 4. 14 Deskripsi Transparansi.....	59
Tabel 4. 15 Deskripsi Efektivitas.....	59
Tabel 4. 16 Hasil Rangkuman Regresi Linear Berganda.....	60
Tabel 4. 17 Hasil Uji T	62
Tabel 4. 18 Hasil Uji F.....	63
Tabel 4. 19 Hasil Koefisien Determination	64
Tabel 4. 20 Interval Kategorisasi Kekuatan Hubungan Korelasi.....	65
Tabel 4. 21 Hasil pengujian hipotesis	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Pengukuran <i>Value For Money</i>	22
Gambar 2. 2 Kerangka Berpikir	29
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Nagari Lansek Kadok	46
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas Grafik P-P Plot.....	54
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heterokedastisitas	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014). Desa yang baik adalah desa yang dimana pemerintah desanya memiliki tujuan utama yaitu untuk mensejahterakan masyarakat. Dimana setiap apa yang direncanakan dan dilakukan semuanya bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Pemerintah desa sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat memiliki peran strategis dalam kemajuan negara. Dimana kesejahteraan masyarakat dapat terjadi jika perangkat pemerintah desa dapat menjadikan sebuah desa menjadi desa yang lebih maju dan produktif. Kemajuan desa dapat memberikan dampak positif untuk perkembangan pemerintahan pusat dan akan berakhir dengan perkembangan di sebuah negara. Perangkat desa atau disebut juga dengan pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintah sekaligus kepentingan masyarakat. Hal yang paling utama dari urusan pemerintah desa adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dipercayakan pengaturannya kepada desa.

Anggaran pemerintah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislative tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi deficit dan surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk satu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. (Anggota IKAPI,

2011: 260). Pemerintahan kabupaten/kota menerima dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagai satu sumber keuangan yang nantinya akan disalurkan untuk setiap desa yang pembagiannya secara proporsional yaitu paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang disebut dengan alokasi dana desa. Kemudian, penyaluran anggaran alokasi dana desa tersebut digunakan sebagai penunjang otonomi daerah/desa guna mewujudkan pemberdayaan masyarakat, memberikan pelayanan serta pembangunan di tingkat desa. Penggunaan alokasi dana desa, memerlukan adanya perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dalam penggunaannya. Perencanaan dan penggunaan alokasi dana desa tidak jauh dari perencanaan dan penggunaan yang telah di atur oleh pemerintah kota/kabupaten, sehingga penggunaan alokasi dana desa bisa tepat dan teratur. Pelaksanaan pembangunan desa sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan dimusyawarahkan masyarakat dengan aparat pemerintah juga berhak mengetahui dan mengawasi apa saja yang telah dijalankan dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, pengelolaan alokasi dana desa yang baik, jujur dan benar merupakan kunci dalam mewujudkan tercapainya otonomi daerah.

Alokasi dana desa yang disalurkan pada pemerintah desa merupakan wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Pengelolaan keuangan alokasi dana desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 2). Pengelolaan alokasi dana desa yang direncanakan serta di realisasikan oleh pemerintah desa akan dibuktikan dengan adanya laporan pertanggungjawaban atau yang kita kenal dengan laporan keuangan daerah. Pengelolaan alokasi dana desa guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera harus bersifat akuntabilitas dan transparansi. Laporan keuangan daerah tersebut nantinya berguna sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah desa serta berguna bagi pengawas daerah untuk melihat kinerja pemerintah desa.

Akuntabilitas pada prinsip dasarnya adalah perusahaan/organisasi harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar, dikelola secara terukur dan memperhitungkan pemangku kepentingan. (Taufiq, 2011: 27). Dalam pengelolaan keuangan dana desa di Nagari Lansek Kadok dimulai dari penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Nagari (RKPNag) oleh aparatur nagari dengan *Stakeholder* melalui kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) untuk merumuskan pembangunan apa yang akan dilakukan dalam kurun 1 tahun anggaran. Wali Nagari nantinya akan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) atau menunjuk salah seorang aparatur nagari untuk menjadi penanggungjawab pada setiap bidang kegiatan. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) melaporkan laporan realisasi anggaran atas penggunaan dana ke Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari (PTPKN) dalam hal ini adalah bendahara nagari. Selanjutnya Wali Nagari menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBNag kepada Bupati per-semester yang diserahkan melalui Badan Keuangan Daerah (BEKAUDA). Wali Nagari nantinya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBNag kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.

Transparansi prinsip dasarnya adalah perusahaan/organisasi harus menyediakan informasi yang memadai dan relevan serta dapat diakses oleh para pemangku kepentingannya (Taufiq, 2011: 27). Tujuan transparansi keuangan sendiri dilakukan agar terhindarnya kecurigaan public terhadap pemerintah daerah dalam penyelewengan dana desa. Pelaksanaan transparansi yang dilakukan pada Nagari Lansek Kadok masih dapat dikatakan kurang memadai, hal ini dinyatakan melalui masih terbatasnya akses yang dilakukan oleh pemerintah nagari dalam memberikan informasi keuangan. Hal ini disebabkan karena masih terbatasnya media yang digunakan dalam memberikan informasi. Pemerolehan informasi hanya di dapat melalui baliho yang di pasang di depan kantor wali, dan pemasangan papan pengumuman penggunaan dana desa pada tempat-tempat yang akan di laksanakan

pembangunan selama proses pembangunan berlangsung. Akses yang terbatas tersebut menyebabkan masyarakat masih belum cukup baik dalam memperoleh informasi dana desa.

Peran akuntabilitas dalam menunjang kinerja keuangan pemerintah desa sangatlah penting. Dimana pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah desa dalam bentuk akuntabilitas laporan keuangan yang nantinya berguna sebagai bukti atas apa yang telah di kelola oleh pemerintah dalam kurun waktu tertentu. Namun peran akuntabilitas disini didukung dengan adanya transparansi laporan keuangan. Hal ini berguna agar dapatnya pihak tertentu dalam memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan pemerintah. Selain itu adanya transparansi pada tokoh masyarakat juga berguna untuk melihat dan mengawasi pengelolaan alokasi dana desa sehingga tidak terjadi penyalahgunaan anggaran. Informasi tersebut nantinya akan menjadi bahan atau acuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah di masa yang akan datang. Hal ini dilakukan agar pengelolaan alokasi dana desa digunakan sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Sehingga tindakan penyalahgunaan anggaran alokasi dana desa dapat dihindari, atau jika kemungkinan terjadinya penyalahgunaan alokasi dana desa dapat dimusyawarahkan dan diarahkan kearah yang lebih tepat dan benar.

Informasi yang diperoleh melalui akuntabilitas dan transparansi keuangan nantinya bertujuan agar segala keputusan dalam pengelolaan alokasi dana desa bisa mencapai hasil yang diharapkan. Informasi pengelolaan laporan keuangan alokasi dana desa nantinya digunakan sebagai bahan ukuran dalam menilai hasil yang diperoleh pemerintah desa. Sehingga apabila tidak tercapainya target dalam memperoleh hasil atas keluaran yang telah dilakukan, bisa diambil kebijakan atau keputusan dalam pencapaian periode berikutnya. Kebijakan yang ditetapkan bermaksud agar pemerintah desa dapat memperoleh hasil yang lebih baik di masa yang akan datang. Penggunaan anggaran alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok telah

dilaksanakan cukup baik. Berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa anggaran yang dikelola telah mencapai target yang diharapkan. Program-program kerja yang telah direncanakan sebelumnya dapat direalisasikan sepenuhnya melalui anggaran yang diperoleh. Kinerja keuangan pemerintah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut (Eviniar & Priyo, 2018) dalam penelitiannya faktor lain yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah adalah transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, partisipasi masyarakat, jumlah penduduk dan jumlah pekerja daerah. Walaupun demikian terlaksananya program yang telah direncanakan, namun untuk melihat tingkat efektifitasnya hal ini terlihat jika semakin besarnya hasil yang diperoleh oleh pemerintah desa atas pengelolaan alokasi dana desa maka akan semakin efektif pemerintah desanya. Sebaliknya jika semakin sedikit hasil yang diperoleh atas pengelolaan alokasi dana desa maka akan semakin kurang efektif pemerintah desanya.

Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman merupakan suatu nagari yang juga memperoleh anggaran alokasi dana desa dari pemerintah pusat. Peneliti memilih Nagari Lansek Kadok sebagai tempat penelitian karena ingin melihat kinerja akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Nagari ini dalam mengelola dana desanya. Melalui wawancara singkat pada pemimpin daerah/wali nagari menyatakan ketika pemerintah daerah ingin meningkatkan kesejahteraan nagari baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta pengawasan dengan selalu meningkatkan kinerja internalnya. Pemerintah Nagari tidak hanya berperan dalam perencanaan dan pengawasan saja, namun ikut terjun langsung dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya upaya penggunaan akuntabilitas dan penerapan transparansi dalam mempertanggungjawaban keuangan di nagarinya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai pengaruh akuntabilitas terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa, pengaruh transparansi terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa, serta keterkaitan pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas keuangan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
2. Transparansi keuangan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
3. Kendala yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan alokasi dana desa yang sering dihadapi oleh kepala desa selaku pemimpin pemerintah desa.
4. Strategi yang digunakan pemerintah desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik dalam infrastruktur maupun pelayanan.
5. Akuntabilitas dan transparansi keuangan berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

C. Batasan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan batasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman?
2. Seberapa besar pengaruh transparansi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman?
3. Seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

F. Manfaat & Luaran Penelitian

Adapun manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, menambah pengetahuan baik secara kemampuan intelektual dan pemahaman secara mendasar mengenai efektivitas pengelolaan alokasi dana desa, akuntabilitas keuangan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa serta transparansi yang dilakukan dalam menilai kinerja pemerintah desa.
2. Bagi pemerintah desa, khususnya pemerintah nagari Lansek Kadok yang nantinya kemungkinan dapat berguna sebagai bahan evaluasi atau pertimbangan kerja dalam pengelolaan alokasi dana desa atas akuntabilitas dan transparansi yang akan dilakukan.
3. Bagi mahasiswa dan umum, diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan dalam melakukan penelitian khususnya untuk bidang akuntansi pemerintahan serta perbandingan hasil penelitian nantinya. Kemudian bagi masyarakat umum diharapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan dalam memahami serta menyikapi permasalahan nagari yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa.

G. Definisi Operasional

Akuntabilitas public adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya public kepada pihak pemberi mandat (*principal*). Akuntabilitas ini akan menjadi tolak ukur dalam melihat kinerja pemerintah desa di Nagari Lansek Kadok, dimana besaran masukan dan pengeluaran akan tergambar melalui laporan keuangan nantinya. Akuntabilitas keuangan harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Pemandagri Nomor 113 Tahun 2014.

Transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang memerlukan informasi. Transparansi maksudnya disini ialah pemberian aksesibilitas atas keuangan desa yang dapat diperoleh melalui media tertentu. Pemerintah Nagari Lansek Kadok

menyediakan akses informasi keuangan secara terbuka dan berkala melalui papan pengumuman yang dipasang di depan kantor Wali Nagari sendiri. Berdasarkan aturan Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 40 menyatakan bahwa penggunaan media informasi lainnya dapat berupa elektronik atau media massa yang dapat memudahkan bagi pengguna informasi.

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wesely*). Akuntabilitas keuangan tersebut akan dijadikan patokan bagi penulis dalam melihat pencapaian pemerintah desa dalam kurun waktu tertentu. Hal ini dapat menjelaskan seberapa efektif pemerintah desa dalam menggunakan anggaran desanya serta pemerolehan hasil atas pencapaian yang telah diraih. Pengukuran efektifitas keuangan desa dapat dilihat melalui besaran persentase keuangan yang diperoleh dari realisasi anggaran dibagi dengan perolehan PAD di tahun yang sama. Sehingga melalui akuntabilitas keuangan pemerintah nagari Lansek Kadok tersebut dapat dilihat besaran nilai efektivitas yang telah diperoleh.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Akuntabilitas

a. Pengertian akuntabilitas

Akuntabilitas public adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya public kepada pihak pemberi mada (*principal*). Dalam konteks organisasi pemerintah, akuntabilitas public adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penekanan utama akuntabilitas public adalah pemberian informasi kepada public dan konstituen lainnya yang menjadi pemangku kepentingan (*stakeholder*). Akuntabilitas public juga terkait dengan kewajiban untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan mengenai apa yang telah, sedang, dan direncanakan akan dilakukan organisasi sector public.

Akuntabilitas berbeda dengan konsep responsibilitas (*responsibility*). Akuntabilitas dapat dilihat sebagai salah satu elemen dalam konsep responsibilitas. Akuntabilitas berarti kewajiban untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, sedangkan responsibilitas merupakan akuntabilitas yang berkaitan dengan kewajiban untuk menjelaskan kepada orang/pihak lain yang memiliki kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban dan memberikan penilaian. (Mahmudi, 2015: 9).

b. Jenis-jenis akuntabilitas public

Akuntabilitas public terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertical (*vertical accountability*), dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*).

- 1) Akuntabilitas vertical (*vertical accountability*) adalah akuntabilitas kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya akuntabilitas kepala dinas kepada bupati dan walikota, menteri kepada presiden, kepala unit kepada kepala cabang, kepala cabang kepada CEO, dan sebagainya.
- 2) Akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*) adalah akuntabilitas kepada public secara luas atau terhadap sesama lembaga lainnya yang tidak memiliki hubungan atasan-bawahan. (Mahmudi, 2015: 9)

c. Dimensi akuntabilitas

Dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh lembaga-lembaga public tersebut antara lain:

1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran

Akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah akuntabilitas lembaga-lembaga public untuk berperilaku jujur dalam bekerja dan menaati ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan dana public harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otorisasi. Akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam menjalankan organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran berkaitan dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan (*abuse of power*), korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menuntut penegakan hukum (*law onfercement*), sedangkan akuntabilitas kejujuran menuntut adanya praktik organisasi yang sehat tidak terjadi malpraktik dan maladministrasi.

2) Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial adalah pertanggungjawaban lembaga public untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efisien dan efektif. Akuntabilitas manajerial dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*). Inefisiensi organisasi public adalah menjadi tanggungjawab lembaga yang bersangkutan dan tidak boleh dibebankan kepada klien atau *customer*-nya.

Akuntabilitas manajerial juga berkaitan dengan akuntabilitas proses (*process accountability*) yang berarti bahwa proses organisasi harus dapat dipertanggungjawabkan, dengan kata lain tidak terjadi inefisiensi dan ketidakefektivan organisasi. Analisis terhadap akuntabilitas sector public akan banyak berfokus pada akuntabilitas manajerial. Namun perlu dipahami bahwa akuntabilitas manajerial ini berbeda dengan akuntabilitas komersial. Akuntabilitas manajerial merupakan akuntabilitas bawahan kepada atasan dalam suatu organisasi, sedangkan akuntabilitas komersial merupakan akuntabilitas suatu perusahaan kepada pemiliknya misalnya akuntabilitas perusahaan BUMN/BUMD kepada pemerintah sebagai pemilik. Akuntabilitas manajerial menjadi perhatian utama manajer sector public dalam melaksanakan system manajemen berbasis kinerja.

3) Akuntabilitas program

Akuntabilitas program berkaitan dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah organisasi telah mempertimbangkan alternative program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal. Lembaga-lembaga public harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program.

Dengan kata lain akuntabilitas program berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu yang mendukung strategi dan pencapaian misi, visi, dan tujuan organisasi.

4) Akuntabilitas kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban lembaga public atas kebijakan-kebijakan yang diambil. Lembaga-lembaga public hendaknya dapat mempertanggungjawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak di masa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu diambil, siapa sasarannya, pemangku kepentingan (*stakeholder*) mana yang akan terpengaruh dan memperoleh manfaat dan dampak (negative) atas kebijakan tersebut.

5) Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas finansial adalah pertanggungjawaban lembaga-lembaga public untuk menggunakan uang public (*public money*) secara ekonomi, efisien, dan efektif tidak ada pemborosan dan kebocoran dana serta korupsi. Akuntabilitas finansial menekankan pada ukuran anggaran dan finansial. Akuntabilitas finansial sangat penting karena pengelolaan keuangan public akan menjadi perhatian utama masyarakat.

Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga-lembaga public untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar. Meskipun informasi mengenai kinerja finansial sangat penting, Namun saat ini ada keyakinan bahwa ukuran kinerja finansial saja tidak cukup, karena ukuran finansial hanya menggambarkan salah satu aspek kinerja organisasi secara keseluruhan. Untuk memperbaiki system

pengukuran kinerja dan akuntabilitas kepada berbagai pemangku kepentingan yang berbeda-beda, ukuran kinerja nonfinansial harus dikembangkan dalam organisasi sector public. Ukuran nonfinansial dalam menentukan akuntabilitas hasil semakin penting dalam system manajemen berbasis kinerja. (Mahmudi, 2015: 9-11).

d. Konsep *value for money* dalam mewujudkan akuntabilitas

Sektor public sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana, dan institusi yang selalu merugi. Tuntutan baru muncul agar organisasi sektor public memperhatikan *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor public yang mendasar pada tiga elemen, yaitu ekonomi efisiensi dan efektivitas.

- 1) Ekonomi: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor public dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
- 2) Efisiensi: pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output/input yang terkait dengan standar kinerja atau target yang ditetapkan.
- 3) Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

Ketiga hal di atas merupakan elemen pokok *value for money*, namun beberapa pihak berpendapat bahwa tiga elemen saja tidak cukup. Perlu ditambahkan dua elemen lain yaitu keadilan (*equity*) dan pemerataan atau kesetaraan (*equality*). Keadilan mengacu pada adanya

kesempatan sosial (*sosial opportunity*) yang sama untuk mendapatkan pelayanan public yang berkualitas dan kesejahteraan ekonomi. Kemudian, perlu dilakukan distribusi secara merata (*equality*), artinya hendaknya tidak hanya tekonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata. (Mardiasmo, 2018: 5)

2. Transparansi

a. Pengertian transparansi

Transparansi keuangan diartikan dengan akurasi laporan pemasukan, pengeluaran, dan sumber dana yang dapat diakses public secara leluasa. Transparansi menurut yang berasal dari kata *transparency* adalah prinsip untuk membuka diri kepada hak masyarakat untuk memperoleh akses informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan organisasi dengan memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. (Mardiasmo, 2018: 32).

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. (Sujarweni, 2015: 155).

Undang-undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa informasi public adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh suatu badan public yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggara Negara dan/atau penyelenggara badan public lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan public. (Undang-undang No 14 Tahun 2008).

b. Transparansi sebagai informasi

Untuk menghasilkan laporan keuangan sector public yang relevan dan dapat diandalkan, terdapat beberapa kendala (*constraints*) yang dihadapi akuntansi sector public. Hambatan tersebut adalah:

1) Objektivitas

Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Laporan keuangan disajikan oleh manajemen untuk melaporkan kinerja yang telah dicapai oleh manajemen selama periode waktu tertentu kepada pihak eksternal yang menjadi *stakeholder* organisasi.

Masalah objektivitas juga dapat dijelaskan melalui teori kontrak (*contracting theory*). Proses kontrak menghasilkan hubungan keagenan (*agency relationship*). Hubungan keagenan muncul ketika salah satu pihak (*principal*) mengontrak pihak lain (*agen*) untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh *principal*. Dengan kontrak tersebut *principal* mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agen*. Karena baik *principal* maupun *agen* kedua-duanya adalah *utility maximiser*, maka tidak ada alasan yang dapat diyakini bahwa *agen* akan selalu bertindak untuk kepentingan *principal*. Masalah keagenan (*agency problem*) kemudian muncul karena adanya perilaku oportunistik (*opportunistic behavior*) dari *agen*, yaitu perilaku manajemen (*agen*) untuk memaksimalkan kesejahteraannya sendiri yang mungkin berlawanan dengan kepentingan *principal*.

Manajemen memiliki dorongan untuk memilih dan menerapkan teknik akuntansi yang bisa mennginformasikan laporan keuangan secara lebih baik sebagai ukuran kinerja organisasi. Manajemen menggunakan variable artifisial misalnya dengan pemilihan teknik akuntansi yang bisa menunjukkan kinerja

yang lebih baik dan menggunakan variable riil (transaksional) yang dilakukan dengan cara melakukan manipulasi transaksi. Oleh karena itu, teknik akuntansi yang digunakan manajemen harus memiliki derajat objektivitas yang dapat diterima semua pihak yang menjadi *stakeholder*.

2) Konsistensi

Konsistensi mengacu pada penggunaan metode atau teknik akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut-turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat diperbandingkan kinerjanya dari tahun ke tahun. Konsistensi penerapan metode akuntansi merupakan hal yang sangat penting karena organisasi memiliki orientasi jangka panjang (*going concern*), sedangkan laporan keuangan hanya melaporkan kinerja selama satu periode. Oleh karena itu, agar tidak terjadi keterputusan proses evaluasi kinerja organisasi oleh pihak eksternal, maka organisasi perlu konsisten dalam menerapkan akuntansinya.

3) Daya banding

Laporan keuangan sector public hendaknya dapat diperbandingkan antarperiode waktu dan dengan instansi lain yang sejenis. Dengan demikian, daya banding berarti bahwa laporan keuangan dapat digunakan untuk membandingkan kinerja organisasi dengan organisasi lain yang sejenis. Kendala daya banding terkait dengan objektivitas karena semakin objektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya bandingnya karena dengan dasar yang sama akan dapat dihasilkan laporan yang berbeda. Selain itu, daya banding juga terkait dengan konsistensi. Adanya beberapa alternative penggunaan metode akuntansi juga dapat menyulitkan tercapainya daya banding.

4) Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut. kendala ketepatan waktu penyajian laporan terkait dengan lama waktu yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menghasilkan laporan keuangan. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan. Permasalahannya adalah semakin banyak kebutuhan informasi, maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut. laporan keuangan semakin disajikan tidak tepat waktu sehingga tidak relevan untuk pengambilan keputusan meskipun disajikan lebih awal.

5) Ekonomis dalam penyajian laporan

Penyajian laporan keuangan membutuhkan biaya. Semakin banyak informasi yang dibutuhkan semakin besar pula biaya yang dibutuhkan. Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan tersebut.

6) Materialitas

Suatu informasi dianggap material apabila memengaruhi keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan akan menghasilkan keputusan yang berbeda. Penentuan materialitas memang bersifat pertimbangan subjektif (*subjective judgement*), namun pertimbangan tersebut tidak dapat dilakukan menurut selera pribadi. Pertimbangan yang digunakan merupakan *professional judgement* yang mendasarkan pada teknik tertentu. (Mardiasmo, 2018: 181-184).

c. Tujuan transparansi

Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk:

- 1) Membandingkan kinerja keuangan actual dengan yang dianggarkan.
- 2) Menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi.
- 3) Membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya.
- 4) Membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas. (Mardiasmo, 2018: 22).

Transparansi berguna untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (SAP, 2011: 28).

3. Efektivitas

a. Pengertian efektivitas

Efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* (hasil) dengan *output* (keluaran). Ukuran efektivitas mengukur kesuksesan organisasi, program, atau aktivitas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Pengukuran efektivitas mengukur hasil akhir suatu pelayanan dikaitkan dengan *output*-nya (*cost of outcome*). Pengukuran efektivitas tidak mungkin bisa dilakukan tanpa mengukur *outcome*. Suatu pelayanan mungkin diproduksi secara efisien akan tetapi tidak efektif karena tidak menambah nilai bagi pelanggan. (Mahmudi, 2015: 105)

Menurut Samodra Wijaya bahwa efektivitas itu paling baik dapat dimengerti jika dilihat dari sudut pandang sejauhmana suatu organisasi berhasil mendapatkan dan memanfaatkan sumber daya dalam usahanya mengejar tujuan organisasi. Sementara menurut Gibson kajian efektivitas organisasi harus dimulai dari yang paling mendasar terletak pada:

- 1) Efektivitas individu yaitu tingkat pencapaian hasil pada kerja individu organisasi.
- 2) Efektivitas kelompok yaitu tingkat pencapaian hasil kerja yang dilakukan oleh sekelompok anggota organisasi.
- 3) Efektivitas organisasi yaitu merupakan kontribusi hasil kerja dari tiap-tiap efektivitas individu dan efektivitas kelompok, atau tim yang saling sinergis. (Zaidan, 2015: 190).

b. Jenis-jenis efektivitas

Berdasarkan pendekatan yang digunakan dalam melakukan pengukuran terhadap konsep efektivitas dalam ruang lingkup organisasi. Menurut Richard M Steers, efektivitas terbagi menjadi:

- 1) Efektivitas dengan pendekatan ukuran yang univariasi, yaitu efektivitas diukur melalui sudut pandang terpenuhinya beberapa kriteria akhir, kerangka acuannya berdimensi tunggal dengan memusatkan perhatian kepada salah satu dimensi atau kriteria yang bersifat evaluative.
- 2) Efektivitas dengan pendekatan ukuran yang multivariasi, yaitu konsep efektivitas melalui sudut pandang terpenuhinya ukuran-ukuran yang berdimensi ganda dan memakai kriteria tersebut secara serempak. (Zaidan, 2015: 191).

c. Indikator efektivitas

Indicator efektivitas harus mengaitkan antara *outcome* yang diharapkan dengan *output* yang dihasilkan. *Outcome* dari suatu

kelompok sasaran tidak semata-mata akibat dari program itu saja. Oleh karena itu, diperlukan indikator efektivitas untuk mengukur efektivitas program. Penentuan indikator efektivitas tersebut hendaknya memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Jumlah peserta program sebagai bagian kelompok sasaran secara keseluruhan. Jumlah peserta program perlu diidentifikasi untuk mengetahui seberapa efektif program tersebut mencapai kelompok sasaran, dalam hal ini untuk mengukur cakupan program (*coverage*).
- 2) Jumlah peserta program yang menunjukkan adanya perubahan perilaku diantara seluruh peserta program. Hal ini mengetahui seberapa besar perubahan terjadi dalam kelompok sasaran (*program impact*).
- 3) Proporsi peserta program yang menunjukkan perubahan perilaku yang diinginkan dibandingkan dengan proporsi orang-orang dalam kelompok sasaran yang menunjukkan adanya perubahan perilaku. Hal ini untuk mengetahui *outcome* yang benar-benar dihasilkan dari program dikaitkan dengan *outcome* yang terjadi karena factor lain.
- 4) Jumlah peserta yang menyatakan bahwa program tersebut sangat bermanfaat. Hal ini mengetahui kepuasan pelanggan.

Indikator efektivitas berguna untuk mengetahui tingkat kesuksesan organisasi dalam mencapai tujuan atau *outcome* yang diharapkan. Identifikasi indikator efektivitas biaya untuk *outcome* suatu program atau subprogram bermanfaat untuk mengukur biaya yang dikeluarkan dalam rangka mencapai *outcome* yang diharapkan. Indikator efektivitas juga bermanfaat untuk memberikan pelaporan eksternal mengenai sejauh mana *output* dari suatu program memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan atau *outcome* harapan. Sementara efektivitas biaya adalah biaya per unit *outcome*.

Efektivitas biaya mengaitkan total *input* dengan unit *outcome* yang dicapai. (Mahmudi, 2015: 166)

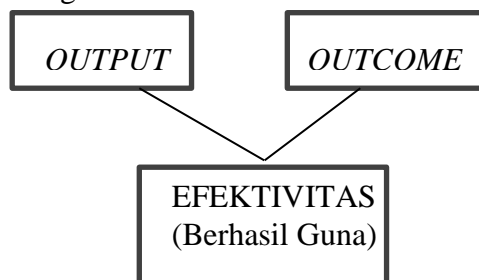
d. Manfaat efektivitas

Berdasarkan penilaian kinerja pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat. Menurut Halim (2002) adapun manfaat efektivitas adalah sebagai berikut:

- 1) Efektivitas pelayanan public, dalam arti pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan tepat sasaran.
- 2) Meningkatkan mutu pelayanan public.
- 3) Menghilangkan setiap in-efisiensi dalam seluruh tindakan pemerintah maka biaya pelayanan yang diberikan menjadi murah dan selalu dilakukan penghematan dalam pemakaian sumber daya.
- 4) Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan public
- 5) Meningkatkan *public cost awareness* sebagai akar dari akuntabilitas public. (Zaidan, 2015: 192).

e. Pengukuran efektivitas

Indicator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi. Hubungan ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Pengukuran Value For Money

1) *Output*

Output merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Pada umumnya *output* yang diinginkan saja yang dibicarakan, sedangkan *output* yang tidak diinginkan atau efek samping, misalnya peningkatan polusi yang terjadi akibat dibuatnya jalan baru, jarang dibicarakan. (Mardiasmo, 2018: 6).

Pengukuran *output* adalah pengukuran keluaran langsung suatu proses. Ukuran menunjukkan hasil implementasi program atau aktivitas. Pengukuran *output* berbentuk kuantitatif dan keuangan atau kuantitatif nonkeuangan. Contoh *output* yang bersifat kuantitatif keuangan adalah jumlah pendapatan yang diperoleh oleh departemen pemasaran atau Badan Pengelola Keuangan Daerah. Sedangkan *output* kuantitatif nonkeuangan dinyatakan dalam bentuk fisik misalnya jumlah lulusan perguruan tinggi, panjang jalan yang di aspal, dan jumlah sekolah yang dibangun. (Mahmudi, 2015: 99)

2) *Outcome*

Outcome mengukur apa yang telah dicapai. Dengan kata lain *outcome* adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau aktivitas dibandingkan dengan hasil yang diharapkan. Hasil yang diharapkan bisa berupa target kinerja yang diharapkan, sedangkan *outcome* adalah hasil nyata yang dicapai. Contoh daerah A terjadi wabah penyakit demam berdarah. Untuk mencegah menjalarnya wabah tersebut ke daerah B, maka dilakukan program vaksinasi di daerah B. hasilnya daerah B tidak terkena wabah DBD. Hasil inilah yang disebut *outcome*, *output*-nya adalah banyaknya orang yang diberi vaksinasi. (Mahmudi, 2015: 99).

Tujuan pengukuran *outcome* adalah untuk mengetahui nilai yang diberikan oleh *stakeholder* terhadap aktivitas suatu program

sector public. Metode pengukuran *outcome* yang sederhana terdiri atas empat tahap, yaitu: identifikasi *stakeholder*, identifikasi tujuan, menentukan indicator *outcome monitoring*, dan efek samping. (Mahmudi, 2015: 121). Sedangkan peran pengukuran *outcome* terbagi dua yaitu: peran retrospektif terkait dengan penilaian kinerja masa lalu, dan peran prospektif terkait dengan perencanaan kinerja di masa yang akan datang. (Mardiasmo, 2018: 169).

f. Rasio efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD (Pagu Alokasi Dasar) yang direncanakan dibandingkan dengan target akan ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil Daerah}}$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dihasilkan mencapai minimal 1 (satu) atau 100%. Semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1996, kriteria tingkat efektivitas anggaran belanja adalah sebagai berikut:

- 1) Jika hasil perbandingan lebih dari 100% maka dikatakan sangat efektif.
- 2) Jika hasil perbandingan antara 90-100%, maka dikatakan efektif.
- 3) Jika hasil perbandingan antara 80-90%, maka dikatakan cukup efektif.

- 4) Jika hasil perbandingan antara 60-80%, maka dikatakan kurang efektif.
- 5) Jika hasil perbandingan dibawah 60%, maka dikatakan tidak efektif. (Ratna, 2020: 21)

Dalam organisasi sector public *output* yang dihasilkan lebih banyak bersifat *output* tidak berwujud (*intangible*) yang tidak mudah untuk dikuantifikasi, maka pengukuran efektivitas sering menghadapi kesulitan. Kesulitan dalam pengukuran efektivitas tersebut adalah karena pencapaian hasil (*outcome*) sering tidak bisa diketahui dalam jangka pendek, akan tetapi jangka panjang setelah program berakhir, sehingga ukuran efektivitas biasanya dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk pernyataan saja (*judgment*). (Mahmudi, 2015: 86).

g. Faktor-Faktor Kinerja Keuangan Pemerintah

Factor-faktor kinerja keuangan pemerintah antara lain:

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang terus dipacu peningkatannya agar dapat dimanfaatkan secara optimal mungkin untuk kepentingan Pemerintah Daerah.

2) Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005 dana alokasi umum adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran daerah masing-masing dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut Peraturan Pemerintah No. 55/2005 dana alokasi khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang mempunyai kebutuhan khusus dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional.

Menurut (Hastroho dan Sunardi, 2016) factor lain yang dianggap mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah adalah tata kelola public dengan melihat transparansi, akuntabilitas, budaya hukum, dan partisipasi masyarakat. Menurut (Darmanto, 2012) selain factor tersebut ada dua factor lain yaitu jumlah penduduk dan jumlah pekerja daerah. (Eviniar & Priyo, 2018: 3).

4. Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. (Pemendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 1).

Alokasi dana desa adalah dana perimbangan yang diperoleh dari anggaran dan pendapatan belanja nagari yang berasal dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam ditambah dana alokasi umum setelah dikurangi dana belanja pegawai, paling sedikit 10% (sepuluh persen). Pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. (Perda Kabupaten Pasaman No 8 Tahun 2007 Pasal 77).

Hal yang paling penting dalam menata pengelolaan keuangan negara/daerah saat ini adalah ketertiban dan keterbukaan dalam menerapkan asas-asas hukum beranggaran, sehingga ada ketepatan waktu dalam melaksanakan siklus anggaran pada setiap tahun anggaran oleh

pemerintah daerah dan DPRD. Beberapa asas penting dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang harus dilaksanakan dan menjadi bagian penting dari spirit politik anggaran yaitu:

- a. Asas tahunan, yaitu asas yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk satu tahun tertentu.
- b. Asas kesatuan, yaitu asas yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
- c. Asas universalitas, yaitu asas yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam satu dokumen anggaran.
- d. Asas spesialisitas, yaitu asas yang mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terperinci secara jelas peruntukannya.
- e. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang mewajibkan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan.
- f. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mewajibkan pengelolaan anggaran secara profesional.
- g. Asas proporsionalitas, yaitu asas yang mewajibkan anggaran dikelola secara proporsional.
- h. Asas transparansi, yaitu asas yang mewajibkan adanya keterbukaan.
- i. Asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, anggaran harus dapat diaudit oleh BPK.
- j. Asas partisipatif, yaitu melibatkan masyarakat dalam pengelolaan keuangan negara. (Hendra, 2017: 34).

B. Penelitian Terdahulu

Made Yoga Darma Putra & Ni Ketut Rasmini (2019) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. Metode penelitian ini yaitu penelitian kuantitatif metode *purposive sampling*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Abiansemal Kabupaten Badung.

Ni Luh Putu Hindrayani & Ni Wayan Alit Erlina Wati (2021) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Kompetensi, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris di Desa Se-Kecamatan Kintamani, Bangli). Metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi kompetensi maka dapat juga meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi akuntabilitas maka dapat juga meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi transparansi maka dapat juga meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

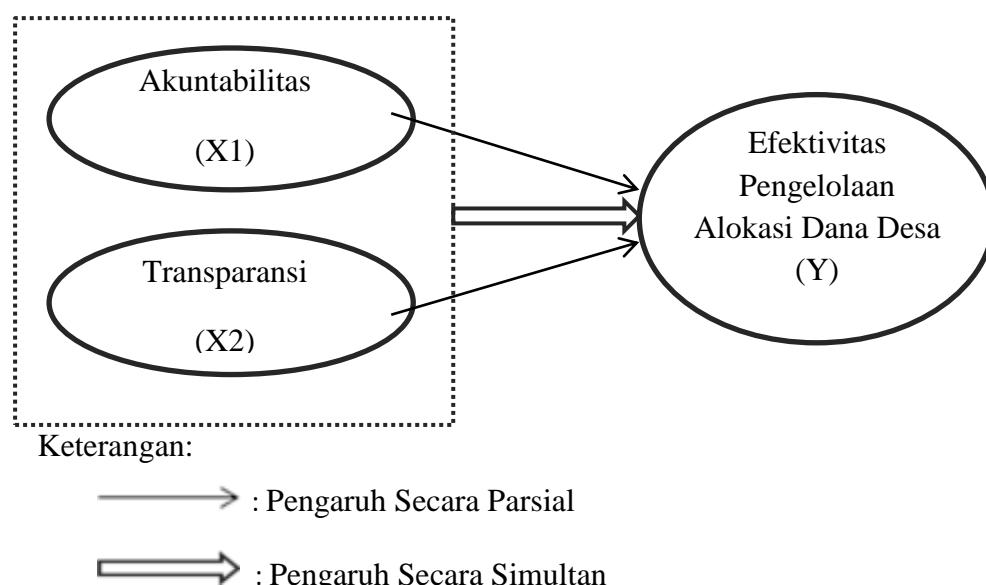
Ridwan Indra Hermawan, Yulita Zanaria & Nedi Hendri (2021) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Hasil penelitian ini diketahui bahwa variable akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa Purworejo Kecamatan Kota Gajah Kabupaten Lampung Tengah.

Hamriani, Rustan DM & Mukhtar Hamzah (2021) melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Efektivitas Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Bulukumba. Metode penelitian yaitu penelitian kuantitatif bersifat kausalitas. Hasil penelitian ini diketahui bahwa akuntabilitas public berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas

kerja anggota DPRD. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas kerja anggota DPRD. Transparansi kebijakan public berpengaruh positif signifikan terhadap efektivitas kerja anggota DPRD. Akuntabilitas public, partisipasi masyarakat, dan transparansi kebijakan public secara bersama-sama berpengaruh terhadap efektivitas kerja anggota DPRD Bulukumba.

C. Kerangka Berpikir

Agar penelitian ini lebih jelas, maka diberikan kerangka berpikir. Untuk lebih bisa dipahaminya penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.2



Gambar 2. 2
Kerangka Berpikir

Pengelolaan APBD oleh pemerintah daerah harus dilaksanakan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, akuntabilitas, dan berkeadilan (UU No. 17 Tahun 2013). Prinsip tata kelola keuangan yang mengedepankan *good financial governance* (GFG) menitikberatkan pada:

1. Adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban,

2. Adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan, semua dokumen anggaran harus dapat diakses oleh public, dan yang tidak boleh diakses hanya rekening Koran dan ketersediaan uang dalam kas daerah,
3. Adanya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, semua pengeluaran dan penggunaan belanja harus dapat dipertanggungjawabkan,
4. Adanya keadilan dalam pengelolaan anggaran, semua alokasi anggaran untuk belanja public dan aparatur harus mengedepankan prinsip keadilan dan tidak diskriminatif (*nondiscrimination*). (Hendra, 2017: 36)

D. Hipotesis

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi sebagai variable bebas (*independen*) terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai variable terikat (*dependen*).

Berdasarkan kerangka berpikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

- Ho 1: Akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
- Ha 1: Akuntabilitas keuangan berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
- Ho 2: Transparansi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
- Ha 2: Transparansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

- Ho 3: Akuntabilitas dan Transparansi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
- Ha 3: Akuntabilitas dan Transparansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah *field research* atau penelitian lapangan yaitu dilakukan di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman dengan pendekatan kuantitatif yang bersifat deskriptif, yang menjelaskan mengenai Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Wali Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Penelitian dilakukan dalam kurun waktu sekitar pada bulan Oktober sampai dengan Desember 2021.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 2017:81). Adapun populasi dalam penelitian ini yaitu 18 Perangkat Nagari Lansek Kadok yang telah berpartisipasi dalam pencapaian tujuan pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Sampel jenuh atau yang biasa disebut dengan (*Total Sampling*) adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini dilakukan bila jumlah populasi relative kecil, kurang dari 30 orang atau penelitian yang ingin membuat generalisasi dengan kesalahan yang sangat kecil. Sehingga sampel yang digunakan adalah sampel jenuh, yaitu seluruh populasi menjadi sampel sebanyak 18 orang.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuisioner kepada pegawai Pemerintah Nagari di Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, dan wawancara kepada

pimpinan Pemerintah Nagari yaitu Kepala Desa/Wali Nagari Lansek Kadok, terakhir penulis melakukan dokumentasi di Kantor Wali Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

E. Pengembangan Instrumen

1. Penyusunan Instrumen Angket

Instrumen yang dilakukan oleh penulis adalah menggunakan kuisioner atau angket yang pernah digunakan oleh penelitian sebelumnya untuk mengetahui pendapat responden. Kuisioner yang disebarkan memakai skala *likert*. Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Untuk analisis data kuantitatif, maka jawaban responden diberi skor sebagai berikut.

Tabel 3. 1
Skor kuisioner

No	Sikap Responden	Skor
1.	Sangat Setuju	5
2.	Setuju	4
3.	Kurang Setuju	3
4.	Tidak Setuju	2
5.	Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Sugiyono (2017: 108)

Dengan skala *likert*, maka variable yang akan diukur dijabarkan menjadi indicator variable. Kemudian indicator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Adapun indicator (kisi-kisi) instrument penelitian yaitu:

Tabel 3. 2
Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Variable	Indicator	Rujukan
Akuntabilitas (X1)	<ul style="list-style-type: none"> • Akuntabilitas kejujuran dan hukum • Akuntabilitas proses • Akuntabilitas program • Akuntabilitas kebijakan • Akuntabilitas finansial 	Mahmudi, (2015: 9)
Tranparansi (X2)	<ul style="list-style-type: none"> • Ketersediaan system informasi • Aksesibilitas terhadap alokasi dana desa • Publikasi laporan keuangan • Ketersediaan informasi kinerja 	Isna, (2019: 116)
Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Y)	<ul style="list-style-type: none"> • Outcome (hasil) • Output (keluaran) 	Mahmudi (2015: 166)

2. Pengujian Instrument Angket

a. Uji Validitas Data

Validitas mengacu pada aspek ketepatan dan kecermatan hasil pengukuran. Pengukuran sendiri dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak (dalam artian kuantitatif) suatu aspek psikologis terdapat dalam diri seseorang, yang dinyatakan oleh skornya pada instrumen pengukuran yang bersangkutan. (Saifuddin, 2019: 40).

Tabel 3. 3
Pedoman Interpretasi *Uncorrected Correlation Coefficients* dalam Studi Validitas Prediktif

Koefisien Validitas	Interpretasi
> 0,35	Sangat Berguna
0,21 – 0,35	Dapat Berguna
0,11 – 0, 20	Tergantung Keadaan
< 0,11	Tidak Berguna

Dalam hal ini dinyatakan bahwa koefisien yang berkisar antara 0,30 sampai dengan 0,50 telah dapat memberikan kontribusi yang baik terhadap efisiensi suatu lembaga pelatihan. Permasalahan yang sering muncul dalam uji validitas antara lain:

- 1) Validitas skor adalah permasalahan sejauhmana validitas skor yang dihasilkan test bukan masalah apakah skor tes valid atau tidak valid.
- 2) Signifikansi korelasi berkaitan langsung dengan ukuran sampel, dengan sampel berukuran besar koefisien yang sangat kecilpun akan dapat dinyatakan signifikan.
- 3) Komputasi koefisien validitas sebagai estimasi terhadap validitas hasil ukur tidak sama dengan pengujian hipotesis nihil mengenai hubungan skor test dan skor kriteria yang menanggung resiko resiko error tipe I tertentu.
- 4) Besarnya koefisien validitas akan berubah dari sampel ke sampel (*group-dependent*) sehingga label validitas bersifat spesifik untuk sampel masing-masing, bukan bersifat umum untuk instrumennya. (Saifuddin, 2019: 149-150).

b. Uji Reabilitas

Reabilitas merupakan penerjemahan dari kata *reliability*. Suatu pengukuran yang mampu menghasilkan data yang memiliki tingkat reabilitas tinggi disebut sebagai pengukuran yang *reliable*. Walaupun istilah reabilitas mempunyai berbagai nama lain seperti seperti konsistensi, keterandalan, keterpercayaan, kestabilan, keajegan, dan sebagainya, namun gagasan pokok yang terkandung dalam konsep reabilitas adalah sejauhmana hasil suatu proses pengukuran dapat dipercaya.

- 5) Konsep reabilitas dalam arti reabilitas alat ukur erat berkaitan dengan masalah eror pengukuran (*error of measurement*). Eror pengukuran sendiri menunjuk pada sejauhmana inkonsistensi hasil

ukur terjadi apabila pengukuran dilakukan ulang pada kelompok subjek yang sama. Konsep reabilitas dalam arti reabilitas hasil ukur erat berkaitan dengan eror dalam pengambilan sampel subjek (*sampling error*) yang mengacu kepada inkonsistensi hasil ukur apabila pengukuran yang dilakukan ulang pada kelompok sampel subjek yang berbeda dari suatu populasi yang sama. Berkaitan dengan hal itu, Thompson (1999) mengatakan bahwa hal yang paling penting untuk difahami adalah bahwa estimasi terhadap reabilitas merupakan fungsi dari skor yang diperoleh dari tes, bukanlah fungsi dari tesnya itu sendiri. (Saifuddin, 2019: 149-150).

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Penggunaan statistic parametris, bekerja dengan asumsi bahwa data setiap variable penelitian yang akan dianalisis membentuk distribusi normal. Bila data tidak normal, maka teknis statistic parametris tidak dapat digunakan untuk alat analisis. Sebagai gantinya digunakan teknik statistic lain yang tidak harus berasumsi bahwa data berdistribusi normal. Teknik analisis itu adalah statistic nonparametris. (Sugiyono, 2017: 75)

2) Uji Multikolinieritas

Istilah multikolinieritas diperkenalkan pertama kali oleh Ragnar Frisch pada tahun 1934. Menurut Frisch dalam buku (Maddala, 2001) suatu model regresi dikatakan terkena masalah multikolinieritas bila terjadi hubungan linear yang sempurna atau mendekati sempurna diantara beberapa atau semua variable bebasnya. Akibatnya model tersebut akan mengalami kesulitan untuk melihat pengaruh variable bebas terhadap variable terikatnya.

Menurut (Gujarati, 2003) penggunaan uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya satu atau lebih variable bebas mempunyai hubungan dengan variable bebas lainnya. Ada *rules of thumb* bahwa suatu model mengandung masalah multikolinearitas apabila model tersebut memiliki R^2 tinggi (misalnya di atas 0,8), tetapi tingkat signifikan variable-variabel penjelasnya berdasarkan uji t statistic yang sedikit.

Cara yang paling mudah untuk mengatasi masalah multikolinearitas adalah menghilangkan/men-drop salah satu variable yang memiliki korelasi tinggi dalam model regresi. Cara lain bisa dengan menambah data penelitian, cara ini bermanfaat jika masalah multikolinearitas akibat kesalahan sampel. Selanjutnya cara ketiga untuk menghilangkan masalah multikolinearitas adalah nilai variable yang digunakan mundur satu tahun. (Erwan & Dyah, 2017: 198).

3) Uji heteroskedastisitas

Suatu model regresi mengandung masalah heterokedastisitas artinya varian variable dalam model tersebut tidak konstan. Akibat adanya masalah heterokedastisitas ini adalah varian penaksirnya tidak minimum sehingga penaksir/estimator dalam model regresi menjadi tidak efisien.

Salah satu cara untuk menghilangkan masalah heterokedastisitas adalah mentransformasi nilai variable menjadi bentuk logaritma. (Erwan & Dyah, 2017: 199).

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dapat dikatakan sebagai proses memanipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian. (Erwan & Dyah, 2017: 93). Pemakaian alat-alat analisis akan sangat tergantung pada apakah variable-variabel penelitian bersifat ketergantungan

(jelas mana variable dependen dan independen) atau saling berketergantungan (tidak memerhatikan mana yang variable dependen dan independen). Adapun metode yang digunakan dalam menganalisis data dan menguji hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis ini dilakukan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara variable atau meneliti seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa. Adapun rumus yang digunakan dalam regresi linear berganda yaitu:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (variable dependen/terikat)

a = Intersep/Bilangan Konstanta

b = Koefisien Variable X

X1 = Akuntabilitas (variable independen/bebas)

X2 = Transparansi (variable independen/bebas).

e = Kesalahan Regresi (*error*) (Erwan & Diah, 2017: 201).

2. Uji Hipotesis

Hipotesis adalah pernyataan atau dugaan yang bersifat sementara terhadap suatu masalah penelitian yang kebenarannya masih lemah (belum tentu kebenarannya) sehingga harus diuji secara empiris. (Erwan & Diah, 2017: 137).

a. Uji T (Parsial)

Uji terhadap nilai statistic t merupakan uji signifikansi parameter individual. Nilai statistic t menunjukkan seberapa jauh pengaruh variable independen secara individual terhadap variable dependennya. Uji terhadap nilai statistic t juga disebut uji parsial yang berupa koefisien regresi. Kita dapat melakukan uji ini dengan mudah

dan singkat sesuai SPSS. Pertama, kita harus merumuskan hipotesis nol yang hendak diuji, yaitu:

$H_0 : \beta = 0$, artinya variable independen bukan merupakan penjelas variable dependen.

$H_a : \beta \neq 0$, artinya variable independen merupakan penjelas variable dependen.

Jika nilai t lebih besar dari 2 (dalam nilai absolut) maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya bahwa variable independen secara individual merupakan penjelas variable dependen. (Erwan & Dyah, 2017: 193 - 194).

b. Uji F (Simultan)

Nilai statistic F menunjukkan apakah semua variable independen yang dimasukkan dalam persamaan/modal regresi secara bersamaan berpengaruh terhadap variable dependen. Nilai statistic F juga dapat dilihat dari output regresi yang dihasilkan oleh SPSS. Seperti uji nilai statistic t , kita hendaknya merumuskan uji hipotesis nol untuk uji nilai statistic F , yaitu:

$H_0 : \beta = 0$, artinya semua variable independen bukan merupakan penjelas variable dependen.

$H_a : \beta \neq 0$, artinya semua variable independen secara simultan merupakan penjelas yang signifikan terhadap variable dependen.

Jika nilai statistic F lebih besar dari 4 maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Semua variable independen yang dimasukkan dalam persamaan/model regresi secara bersamaan berpengaruh terhadap variable dependen. (Erwan & Dyah, 2017: 194).

c. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi yang sering disimbolkan dengan " R^2 " pada prinsipnya mengukur seberapa besar kemampuan model menjelaskan variasi variable dependen. Jadi koefisien determinasi

sebenarnya mengukur besarnya persentase pengaruh semua variable independen dalam model regresi terhadap variable dependennya.

Besarnya nilai koefisien determinasi berupa persentase, yang menunjukkan persentase variasi nilai variable dependen yang dapat dijelaskan oleh model regresi. Apabila nilai koefisien determinasi dalam model regresi semakin kecil (mendekati nol) berarti semakin kecil pengaruh semua variable independen terhadap variable dependennya. Atau dengan kata lain, nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan semua variable independen dalam menjelaskan variable dependen sangat terbatas. Sebaliknya, apabila nilai R^2 semakin mendekati 100% berarti semua variable independen dalam model memberikan hampir semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variable dependennya atau semakin besar pengaruh semua variable independen terhadap variable dependen. Misalnya nilai $R^2 = 0,85$, artinya bahwa variasi nilai Y yang dapat dijelaskan oleh model regresi adalah 85% dan selebihnya atau sebesar 15%, variasi variable Y dipengaruhi oleh variable lain di luar model regresi. (Erwan & Dyah, 2017: 195).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Perusahaan

1. Gambaran Umum

Pelaksanaan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pasal 40 ayat (1) tentang laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes telah diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah Desa Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman telah melaksanakan ketentuan Permendagri No 113 tahun 2014 tentang pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sesuai dengan format aturan yang berlaku.

Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No 8 tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari pada Pasal 52 mengenai pedoman penyusunan APB nagari, perubahan APB nagari, perhitungan APB nagari dan pertanggungjawaban APB nagari ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pemerintah Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus kepentingan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat nagari. Penyelenggaraan pemerintah nagari terdiri dari wali nagari dan secretariat nagari.

2. Visi dan Misi

Visi dan Misi Pemerintah Desa Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman sebagai berikut:

Visi: Terwujudnya Nagari Lansek Kadok yang Agamis, Mandiri, Sehat dan Sejahtera.

Misi: Berupaya mendorong, membina, serta mengajak kerja sama unsur terkait untuk meningkatkan fungsi masjid dan mushola melalui Pengajian, Diskusi Ilmiah, Pondok Qur'an, Rumah Tahfis, Remaja Masjid, Gharim dan Lembaga TPQ & TPSQ serta kegiatan lainnya untuk meningkatkan kenegerian Lansek Kadok.

3. Susunan Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No 8 tahun 2007 maka Struktur Organisasi Pemerintah Nagari adalah sebagai berikut:

a. Wali Nagari

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No 8 Tahun 2007 tentang tugas Wali Nagari yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

b. Secretariat, terdiri dari:

- 1) Urusan pemerintahan,
- 2) Urusan ekonomi dan pembangunan,
- 3) Urusan pelayanan umum,
- 4) Urusan kesejahteraan rakyat, dan
- 5) Urusan ketentraman dan ketertiban.
- 6) Teknis Lapangan terdiri dari Sarjana Pendamping Pembangunan Nagari (SPPN) dan Dai' Nagari
- 7) Kepala jorong sebagai unsur kewilayahan.

c. Badan Permusyawaratan Nagari, terdiri dari:

- 1) Niniak Mamak,
- 2) Alim Ulama,
- 3) Cadiak Pandai,
- 4) Bundo Kandung/Keterwakilan Perempuan dan Pemuda.

d. Panitia Pemekaran Nagari (Tim Penggerak PKK), terdiri dari:

- 1) Ketua
- 2) Wakil ketua

- 3) Sekretaris
- 4) Anggota, yang merupakan perwakilan dari Niniak Mamak, Alim Ulama, Cerdik Pandai, Bundo Kandung/Keterwakilan Perempuan, dan Tokoh Pemuda.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No 8 Tahun 2007 tentang tugas dan fungsi Panitia Pemekaran Nagari.

Uraian tugas Panitia Pemekaran Nagari antara lain:

- 1) Melaksanakan sosialisasi rencana pemekaran nagari kepada masyarakat termasuk yang berada di perantauan.
 - 2) Membantu menyediakan data dan informasi.
 - 3) Menampung aspirasi masyarakat dan meyalurkan kepada lembaga.
 - 4) Melaporkan hasil kesepakatan beserta dokumen pendukung kepada Wali Nagari.
 - 5) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Wali Ngari.
- e. Kerapatan Adat Nagari (Niniak Mamak), terdiri dari:
- 1) Pucuk Adat,
 - 2) Niniak Mamak Salingka Adat Nagari.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No 8 Tahun 2007 tentang tugas dan fungsi Kerapatan Adat Nagari.

Uraian tugas Kerapatan Adat Nagari antara lain:

- 1) Mengurus dan mengelola hal-hal yang berkaitan dengan adat sehubungan dengan sako dan pusako.
- 2) Menyelesaikan perkara-perkara perdata adat.
- 3) Mengusahakan perdamaian dan memberikan nasihat di bidang hukum adat terhadap anggota masyarakat yang bersengketa serta memberikan kekuatan hukum terhadap sesuatu hal dan pembuktian lainnya menurut sepanjang adat atau silsilah keturunan/ranji.

- 4) Mengembangkan kebudayaan anak nagari dalam upaya melestarikan kebudayaan daerah dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional.
- 5) Membina masyarakat hukum adat nagari menurut Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.
- 6) Melaksanakan pembinaan dan mengembangkan nilai-nilai adat Minangkabau dalam rangka mempertahankan kelestarian adat dalam nagari.

Uraian fungsi Kerapatan Adat Nagari antara lain:

- 1) Sebagai lembaga yang menjaga dan melestarikan adat di nagari.
- 2) Sebagai lembaga pendidikan dan pengembangan Adat.
- 3) Sebagai lembaga adat, membantu Wali Nagari dalam mendamaikan perselisihan masyarakat nagari.
- 4) Mengurus urusan adat dan istiadat dalam nagari.
- 5) Sebagai mitra Pemerintahan Nagari dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta kekayaan nagari.

f. Lembaga Kemasyarakatan Nagari

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Nagari dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman No 8 Tahun 2007 tentang tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Nagari.

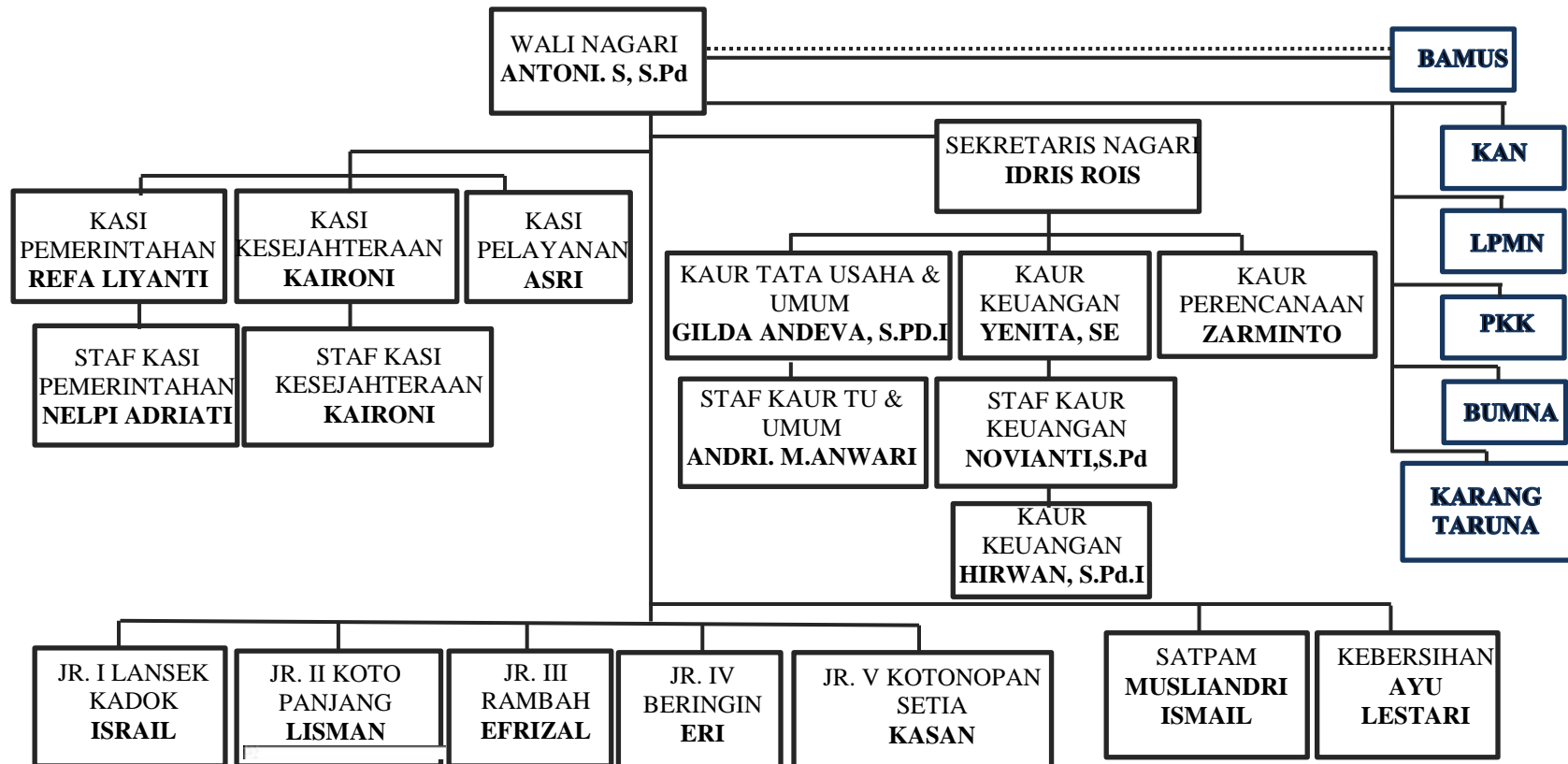
Uraian tugas Lembaga Kemasyarakatan Nagari antara lain:

- 1) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- 2) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif

- 3) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat
- 4) Menumbuhkembangkan kondisi dimana masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Uraian fungsi Lembaga Kemasyarakatan Nagari antara lain:

- 1) Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dan pembangunan
 - 2) Penanaman dan penumpukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - 3) Peningkatan kualitas dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
 - 4) Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif
 - 5) Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat
 - 6) Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga
 - 7) Pemberdayaan hak politik masyarakat.
- a. Karang Taruna.



Gambar 4. 1
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH DESA NAGARI LANSEK KADOK
KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN

B. Gambaran Umum Objek Penelitian

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dengan melakukan metode survey menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada beberapa responden. Adapun responden yang dilibatkan dalam penelitian ini yaitu keseluruhan pegawai Pemerintah Desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Data dalam penelitian ini diolah dengan teknik analisis data yang telah ditentukan sebelumnya. Pengolahan data yang dilakukan bertujuan untuk pencapaian hasil akhir penelitian. Adapun ringkasan penyebaran kuesioner beserta perolehan kuesioner yang kembali pada peneliti disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 4. 1
Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner

Keterangan	Jumlah Kuesioner	Persentase
Kuesioner yang disebarakan	18	100%
Kuesioner yang dikembalikan	18	100%
Kuesioner yang akan diolah	18	100%

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan tabel diatas, hal itu menunjukkan bahwa tingkat pengembalian kuesioner di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Terlihat besaran jumlah responden yang diperoleh dari pengembalian kuesioner tinggi, sehingga kuesioner yang bisa diolah telah memenuhi total populasi yang dibutuhkan yaitu sebesar 100% dengan jumlah responden sebanyak 18 orang.

1. Pengujian Instrumen Angket

a. Uji Validitas Data

Pengujian validitas item dalam SPSS *statistic 22 for windows* bisa menggunakan tiga metode analisis, yaitu *person correlation*, *kendall's tau b correlation*, dan *spearman correlation*. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode korelasi person. Teknik uji validitas item dengan korelasi person yaitu dengan cara

mengkorelasikan skor item dengan skor totalnya. Skor total adalah penjumlahan seluruh item pada satu variable. Dalam melakukan uji validitas ini, peneliti menggunakan metode komputerisasi SPSS *statistic 22 for windows*. Kriteria validitas mengacu pada aturan Nitko (Sumarna, 2006) apabila angka validitas $> 0,3$ maka dapat dikatakan telah memenuhi syarat validitas (Sugiyono, 2020:197). Jika nilai positif dan $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dapat dinyatakan valid, jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid, jika ada item yang tidak valid maka harus diperbaiki atau dibuang. Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk membuang yang tidak valid.

1) Akuntabilitas

Uji validitas data digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan atau kesahan suatu kuesioner. Uji kualitas data dilakukan pada variable-variabel yang diteliti baik variable independen maupun dependen. Data dinyatakan valid jika nilai r_{hitung} yang merupakan nilai dari *Corrected Item Total Correlation* lebih besar dari r_{tabel} .

Tabel 4. 2
Hasil Uji Validitas Nilai Akuntabilitas

Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1.1	0,591	0.3	Valid
X1.2	0,917	0.3	Valid
X1.3	0,893	0.3	Valid
X1.4	0,381	0.3	Valid
X1.5	0,381	0.3	Valid
X1.6	0,261	0.3	Tidak Valid
X1.7	0,179	0.3	Tidak Valid
X1.8	0,350	0.3	Valid
X1.9	0,476	0.3	Valid
X1.10	0,818	0.3	Valid
X1.11	0,656	0.3	Valid
X1.12	0,725	0.3	Valid

Sumber: data primer 2021 (diolah menggunakan SPSS 22)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk variable akuntabilitas ini untuk item X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, X1.8, X1.9, X1.10, X1.11, X1.12 pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sedangkan item X1.6 dan X1.7 dinyatakan tidak valid karena $r_{hitung} < r_{tabel}$. Jika ada item yang tidak valid maka harus diperbaiki atau dibuang. Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk membuang yang tidak valid.

2) Transparansi

Uji validitas data digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan atau kesahan suatu kuesioner. Uji kualitas data dilakukan pada variable-variabel yang diteliti baik variable independen maupun dependen. Data dinyatakan valid jika nilai r_{hitung} yang merupakan nilai dari *Corrected Item Total Correlation* lebih besar dari r_{tabel} .

Tabel 4. 3
Hasil Uji Validitas Nilai Transparansi

Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X2.1	0,470	0.3	Valid
X2.2	0,737	0.3	Valid
X2.3	0,613	0.3	Valid
X2.4	0,120	0.3	Tidak Valid
X2.5	0,144	0.3	Tidak Valid
X2.6	0,010	0.3	Tidak Valid
X2.7	0,010	0.3	Tidak Valid
X2.8	0,338	0.3	Valid
X2.9	0,232	0.3	Tidak Valid
X2.10	0,493	0.3	Valid

Sumber: data primer 2021 (diolah menggunakan SPSS 22)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk variable tranparansi ini untuk item X2.1, X2.2, X2.3, X2.8, X2.10 pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sedangkan item X2.4, X2.5, X2.6, X2.7, X2.9, dinyatakan tidak

valid karena $r_{hitung} < r_{tabel}$. Jika ada item yang tidak valid maka harus diperbaiki atau dibuang. Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk membuang yang tidak valid.

3) Efektivitas

Uji validitas data digunakan untuk mengetahui tingkat kevalidan atau kesahan suatu kuesioner. Uji kualitas data dilakukan pada variable-variabel yang diteliti baik variable independen maupun dependen. Data dinyatakan valid jika nilai r_{hitung} yang merupakan nilai dari *Corrected Item Total Correlation* lebih besar dari r_{tabel} .

Tabel 4. 4
Hasil Uji Validitas Nilai Efektivitas

Item	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
Y1	0,513	0.3	Valid
Y2	0,513	0.3	Valid
Y3	0,136	0.3	Tidak Valid
Y4	0,443	0.3	Valid
Y5	0,185	0.3	Tidak Valid
Y6	0,748	0.3	Valid
Y7	0,895	0.3	Valid
Y8	0,698	0.3	Valid

Sumber: data primer 2021 (diolah menggunakan SPSS 22)

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa untuk variable efektivitas pengelolaan dana desa ini untuk item Y1, Y2, Y4, Y6, Y7, Y8 pernyataan dinyatakan valid karena $r_{hitung} > r_{tabel}$ sedangkan item Y3 dan Y5 dinyatakan tidak valid karena $r_{hitung} < r_{tabel}$. Jika ada item yang tidak valid maka harus diperbaiki atau dibuang. Dalam penelitian ini peneliti memilih untuk membuang yang tidak valid.

b. Uji Reabilitas Data

Data untuk mencari reabilitas data pada SPSS 22 *for Windows* digunakan salah satu teknik yaitu menggunakan rumus Alpha, dimana fasilitas yang digunakan untuk mengukur reabilitas yaitu melalui uji statistic *Cronbach Alpha* dan variable yang dikatakan reliable jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,6. Dan dikatakan tidak reliable jika *Cronbach Alpha* < 0.6 (Sugiyono, 2020:198).

Berikut hasil uji reabilitas angket yang telah peneliti lakukan dengan menggunakan SPSS 22 *for Windows*.

1) Angket Akuntabilitas

Tabel 4. 5
Hasil Uji Reabilitas Angket Akuntabilitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.823	10

Sumber: data primer 2021 (diolah menggunakan SPSS 22)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil reabilitas yang dilakukan terhadap angket akuntabilitas adalah nilai 0,823 > 0,6. Maka berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa angket uji reabilitas akuntabilitas dinyatakan reliable.

2) Angket Transparansi

Tabel 4. 6
Hasil Uji Reabilitas Angket Transparansi

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.608	5

Sumber: data primer 2021 (diolah menggunakan SPSS 22)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil reabilitas yang dilakukan terhadap angket transparansi adalah nilai 0,608

> 0,6. Maka berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa angket uji reabilitas transparansi dinyatakan reliable.

3) Angket Efektivitas

Tabel 4. 7
Hasil Uji Reabilitas Angket Efektivitas

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.760	6

Sumber: data primer 2021 (diolah menggunakan SPSS 22)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa hasil reabilitas yang dilakukan terhadap angket efektivitas adalah nilai 0,760 > 0,6. Maka berdasarkan nilai tersebut dapat disimpulkan bahwa angket uji reabilitas efektivitas dinyatakan reliable.

Dari uji angket dengan menggunakan uji validitas dan reabilitas tersebut dapat disimpulkan bahwa angket tersebut bisa digunakan dalam penelitian ini dengan total item pernyataan pada penelitian ini sebanyak 21 pernyataan.

c. Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Uji normalitas diujikan pada nilai residual semua variable penelitian yang meliputi: akuntabilitas dan transparansi (Independent) terhadap efektivitas (dependent). Pengujian normalitas menggunakan *Kolmogrov-Smirnov* dan untuk perhitungannya menggunakan *SPSS 22 for Windows*. Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi > 0,05 dan data berdistribusi tidak normal apabila nilai signifikansi < 0,05. Hasil uji normalitas nilai residual penelitian ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Normalitas Nilai Residual

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			18
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.22377262
Most Extreme Differences	Absolute		.275
	Positive		.275
	Negative		-.156
Test Statistic			.275
Asymp. Sig. (2-tailed)			.001 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.111 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.103
		Upper Bound	.119

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

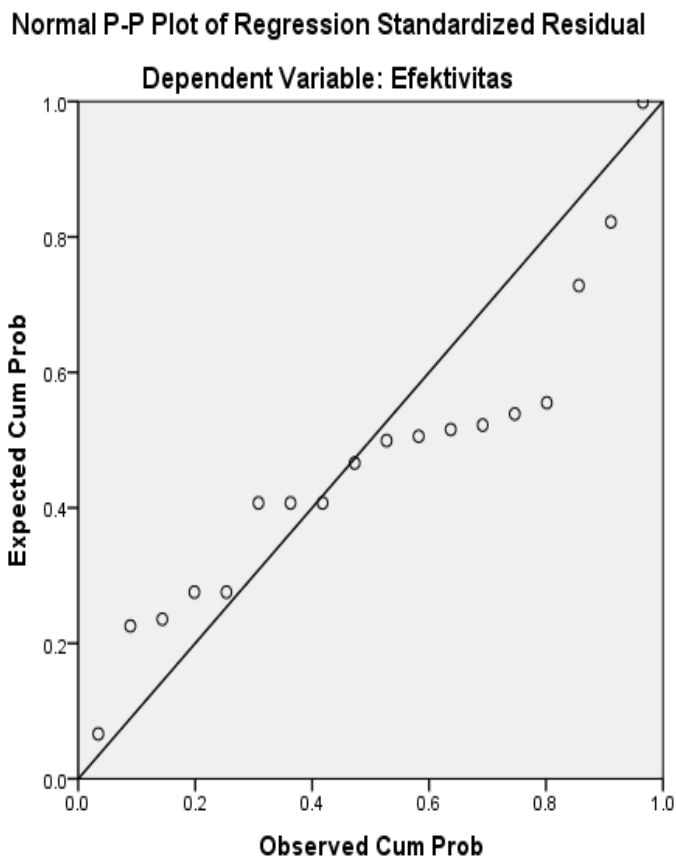
c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.

Sumber: data primer 2021 (diolah menggunakan SPSS 22)

Pengujian normalitas data dapat dilakukan dengan tiga metode yaitu: *Asymptotic Only*, *Monte Carlo* dan *Exact P Values*. Peneliti dalam hal ini menggunakan metode *Monte Carlo* karena penentuan total data yang digunakan berjumlah kecil. (Cyrus & Nitin, 2019: 24)

Dari data di atas hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikan mempunyai nilai sebesar 0,119 karena signifikansi lebih besar dari 0,05, sehingga dapat dinyatakan bahwa nilai residual berdistribusi normal. Uji normalitas juga dilakukan dengan melihat grafik normal *P-P Plot Of Regression Residual* yang dapat dilihat melalui grafik dibawah ini:



Gambar 4. 2
Hasil Uji Normalitas Grafik P-P Plot

Berdasarkan gambar 4.2 uji normalitas dengan menggunakan grafik Normal *P-P Plot* terlihat bahwa data tersebar disekitar garis diagonal dan menyebar sepanjang garis histogramnya. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian memiliki pola distribusi normal. Distribusi normal membentuk garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui hubungan korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)*. Dasar pengambilan keputusan dalam uji multikolinearitas adalah sebagai berikut:

- a) Jika nilai *tolerance* adalah $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas.
- b) Jika nilai *tolerance* adalah $< 0,10$ dan nilai VIF > 10 maka model yang diajukan dalam penelitian mengalami multikolinearitas (Janie, 2012:19-23).

Tabel 4. 9
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.039	5.731		.356	.727		
Akuntabilitas	.054	.096	.095	.564	.581	.992	1.008
Transparansi	.989	.223	.747	4.442	.000	.992	1.008

a. Dependent Variable: Efektivitas

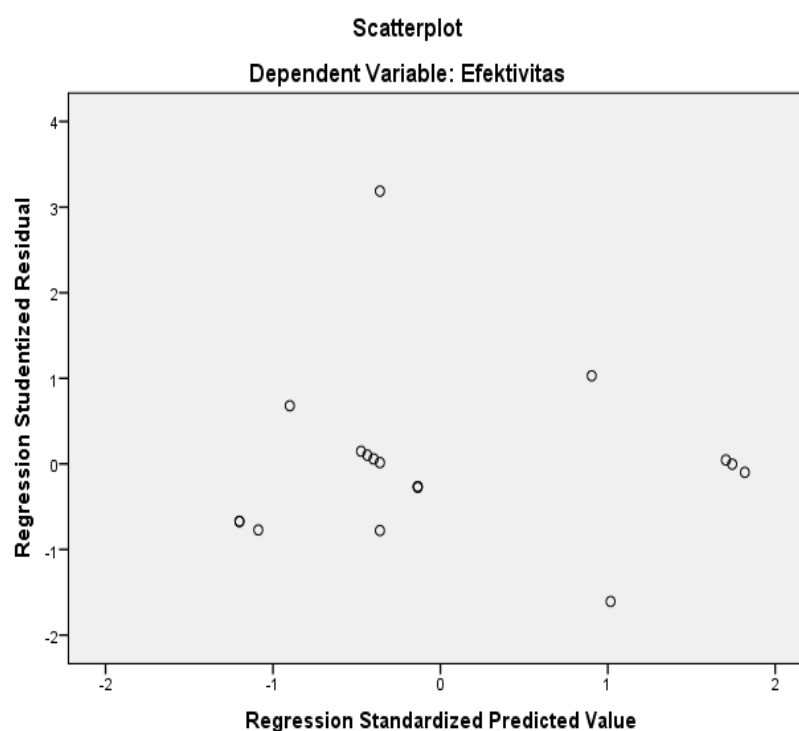
Sumber: data primer 2021 (diolah menggunakan SPSS 22)

Dari hasil perhitungan yang ada pada table uji multikolinearitas diatas, variabel X1 (akuntabilitas) dan variabel X2 (transparansi) memiliki nilai *tolerance* 0,992 lebih besar dari 0,10 dan VIF 1,008 lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian bebas dari multikolinearitas.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual antara satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji *Scatterplot* dengan bantuan SPSS *statistics 22 for windows* dengan melihat nilai prediksi variabel independen yaitu ZPRED dengan residunya SRESID. Dasar pengambilan keputusan pada uji heteroskedastisitas *Scatterplot*

adalah apabila semua titik-titik tersebar secara bergelombang atau membentuk sebuah pola di atas nilai 0 atau dibawahnya maka terjadi heteroskedastisitas, apabila tidak terdapat pola yang jelas atau titik-titik menyebar merata dibawah nilai 0 dan diatas nilai 0 maka heteroskedastisitas tidak terjadi (Janie, 2012, hal. 24-26). Adapun hasil uji heterokedastisitas di gambarkan sebagai berikut:



Sumber: data primer 2021 (diolah menggunakan SPSS 22)

Gambar 4. 3
Hasil Uji Heterokedastisitas

Gambar diatas terlihat bahwa titik-titik menyebar merata dibawah dan diatas nilai nol, sehingga disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model penelitian.

2. Deskripsi Responden

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun deskripsi data responden keseluruhan Pemerintah Nagari (Perangkat Nagari) diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4. 10
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	13	72,2%
Perempuan	5	27,8%
Total	18	100%

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan pada tabel di atas responden yang ikut berpartisipasi pada penelitian ini yaitu laki-laki sebanyak 12 orang dengan persentase 72,2% dan perempuan sebanyak 5 orang dengan persentase 27,8%.

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

Adapun deskripsi data responden keseluruhan Pemerintah Nagari (Perangkat Nagari) diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4. 11
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD/MI	0	0%
2	SMP/MTS	0	0%
3	SLTA (SMA/SMK)	13	72,2%
4	SARJANA (S1)	5	27,8%
	Total	18	100%

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan pada tabel di atas responden yang ikut berpartisipasi pada penelitian ini dengan klasifikasi pendidikan yaitu SLTA (SMA/SMK) sebanyak 13 orang dengan persentase 72,2% dan SARJANA (S1) sebanyak 5 orang dengan persentase 27,8%.

c. Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Adapun deskripsi data responden keseluruhan Pemerintah Nagari (Perangkat Nagari) diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4. 12
Karakteristik Responden Berdasarkan Umur

Pendidikan	Jumlah	Persentase
<40 Tahun	4	22%
40-50 Tahun	10	56%
>50 Tahun	4	22%
Total	18	100%

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan pada tabel di atas responden yang ikut berpartisipasi pada penelitian ini dengan klasifikasi umur yaitu <40 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 22%, 40-50 tahun sebanyak 10 orang dengan persentase 56%, dan >50 tahun sebanyak 4 orang dengan persentase 22%.

3. Deskripsi Variabel Penelitian

a. Akuntabilitas

Tabel 4. 13
Deskripsi Akuntabilitas

Kategori	X1 .1	X1 .2	X1 .3	X1 .4	X1 .5	X1 .6	X1 .7	X1 .8	X1 .9	X1 10	%
Sangat Setuju	5	4	3	2	2	0	0	4	4	6	17%
Setuju	10	9	10	16	16	13	16	14	14	12	72%
Kurang Setuju	3	5	5	0	0	3	2	0	0	0	10%
Tidak Setuju	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1%
Sangat Tidak Setuju	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	100%

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan hasil angket yang diperoleh jumlah jawaban untuk variable akuntabilitas adalah sebesar 17% responden mengatakan sangat setuju, 72% responden mengatakan setuju, 10% responden mengatakan kurang setuju dan 1% responden mengatakan tidak setuju.

Sumber: Data Primer diolah 2021

Berdasarkan hasil angket yang diperoleh jumlah jawaban untuk variable efektivitas adalah sebesar 13% responden mengatakan sangat setuju, 79% responden mengatakan setuju, 8% responden mengatakan kurang setuju.

Dari perhitungan dapat diketahui bahwa deskriptif variable efektivitas memiliki jumlah nilai setuju sebesar 79%, hal ini menunjukkan bahwa tanggapan responden terhadap item pernyataan efektivitas adalah setuju.

C. Analisis Data

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Uji ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 16
Hasil Rangkuman Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.039	5.731		.356	.727
Akuntabilitas	.054	.096	.095	.564	.581
Transparansi	.989	.223	.747	4.442	.000

a. Dependent Variable: Efektivitas

Sumber: data primer 2021 (diolah menggunakan SPSS 22)

Berdasarkan tabel di atas hasil regresi linear dapat diketahui persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

$$Y = 2,039 + 0,054X_1 + 0,989X_2$$

Pada model regresi yang telah didapatkan dengan taksiran diatas, yaitu maka memperlihatkan bahwa taksiran *intersep* a sebesar

2,039 dan taksiran parameter b_1 sebesar 0,054 dan taksiran parameter b_2 sebesar 0,989. Penjelasan dari persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) adalah 2,039 ini dapat diartikan jika akuntabilitas dan transparansi nilainya adalah 0, maka efektivitas pengelolaan dana desa nilainya sebesar 2,039.
- b. Nilai koefisien regresi variable akuntabilitas (b_1) bernilai positif, yaitu 0,054 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan nilai efektivitas sebesar 0,054. Dengan asumsi bahwa variable independen lain nilainya tetap.
- c. Nilai koefisien regresi variable transparansi (b_2) bernilai positif, yaitu 0,989 ini dapat diartikan bahwa setiap peningkatan transparansi sebesar 1 satuan, maka akan meningkatkan nilai efektivitas sebesar 0,989. Dengan asumsi bahwa variable independen lain nilainya tetap.

1. Uji Hipotesis

a. Uji T (Parsial)

Uji T merupakan pengujian untuk menunjukkan pengaruh secara individu variable bebas yang ada di dalam model terhadap variable terikat. Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh satu variable bebas menjelaskan variable terikat. Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan nilai signifikan kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variable bebas secara parsial berpengaruh terhadap variable terikat.

Tabel 4. 17
Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	1 (Constant)	2.039	5.731				.356
Akuntabilitas	.054	.096	.095	.564	.581	.992	1.008
Transparansi	.989	.223	.747	4.442	.000	.992	1.008

a. Dependent Variable: Efektivitas

Sumber: data primer 2021 (diolah menggunakan SPSS 22)

Dari tabel di atas didapatkan t_{hitung} dari masing-masing variable bebas. Selanjutnya t_{hitung} penelitian dibandingkan dengan t_{tabel} dengan taraf kesalahan 5% dan derajat kebebasan (df) = $n-2 = 18-2 = 16$ diperoleh t_{tabel} 1,745. Berdasarkan hasil uji t yang dilakukan dengan alat bantu SPSS *statistic 22 for windows* pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Akuntabilitas

Hasil statistic uji t untuk variable akuntabilitas (X1) diperoleh t_{hitung} sebesar 0,564 dan t_{tabel} sebesar 1,745, karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,564 < 1,745$), sedangkan untuk signifikan lebih besar dari 0,05 ($0,581 > 0,05$). Maka H_0 1.1 diterima dan H_a 1.2 ditolak, artinya bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

2) Transparansi

Hasil statistic uji t untuk variable transparansi (X2) diperoleh t_{hitung} sebesar 4,442 dan t_{tabel} sebesar 1,745, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,442 > 1,745$), sedangkan untuk signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka H_0 2.1 ditolak dan H_a 2.2 diterima, artinya bahwa transparansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas

pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

b. Uji Simultan (Uji-F)

Menurut Erwan (2017: 194) nilai statistic F menunjukkan apakah semua variable independen (akuntabilitas dan transparansi) yang dimasukkan dalam persamaan/model regresi secara bersamaan berpengaruh terhadap variable dependen (efektivitas).

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistic F dengan kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

- 1) Jika nilai probabilitas signifikan $> 0,05$ maka H_a ditolak. H_a di tolak mempunyai arti bahwa variable independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variable dependen.
- 2) Jika nilai probabilitas signifikan $< 0,05$, maka H_a diterima. H_a tidak dapat ditolak mempunyai arti bahwa variable independen berpengaruh signifikan terhadap variable dependen.

Tabel 4. 18
Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	35.040	2	17.520	10.322	.002 ^b
Residual	25.460	15	1.697		
Total	60.500	17			

a. Dependent Variable: Efektivitas

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Sumber: data primer 2021 (diolah menggunakan SPSS 22)

Dari tabel di atas hasil pengujian diperoleh nilai F hitung sebesar 10,322 dan F tabel sebesar 3,63. F tabel di peroleh dari Tabel F dengan rincian: (Df1 = K -1 \Rightarrow 3-1 = 2) dan (Df2 = N-K \Rightarrow 18-2=16) dimana keterangan: K = Jumlah Variabel N = Jumlah Responden) dengan signifikan sebesar 0,002.

Oleh karena $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($10,322 > 3,63$) dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$), maka H_0 3.1 ditolak dan H_a 3.2 diterima. Maka dapat diartikan bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

c. Uji Koefisien Determination (R^2)

Menurut Erwan (2017: 195) koefisien determinasi sebenarnya mengukur besarnya persentase pengaruh semua variable independen (akuntabilitas dan transparansi) dalam model regresi terhadap variable dependennya (efektivitas).

Nilai koefisien determinasi dalam model regresi semakin kecil (mendekati nol) berarti semakin kecil pengaruh semua variable independen (akuntabilitas dan transparansi) terhadap variable dependennya (efektivitas). Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan semua variable independen dalam menjelaskan variable dependen sangat terbatas. Sebaliknya apabila nilai R^2 semakin mendekati 100% berarti semua variable independen dalam model memberikan hamper semua informasi yang diperlukan untuk memprediksi variable dependennya atau semakin besar pengaruh semua variable independen terhadap variable dependen.

Tabel 4. 19
Hasil Koefisien Determination

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.761 ^a	.579	.523	1.303

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Efektivitas

Sumber: data primer 2021 (diolah menggunakan SPSS 22)

Dari tabel di atas diperoleh angka *R square* sebesar 0,579 atau 57,9%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variable independen yaitu akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas adalah sebesar 57,9%. Sedangkan sisanya 42,1% dipengaruhi oleh variable lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Untuk mengetahui kualitas hubungan antar variable independen (akuntabilitas dan transparansi) dengan variable dependen (efektivitas), maka dapat diketahui dari koefisien korelasi dengan enterval nilai sebagai berikut:

Tabel 4. 20
Interval Kategorisasi Kekuatan Hubungan Korelasi

Koefisien	Kekuatan Hubungan
0	Tidak ada korelasi
0,00 - 0,199	Korelasi sangat rendah
0,20 – 0,399	Korelasi rendah
0,40 – 0,599	Korelasi sedang
0,60 – 0,799	Korelasi kuat
0,80 – 0,999	Korelasi sangat kuat
1	Korelasi sempurna

Sumber: Armos (2014 : 129)

Dari tabel di atas di peroleh angka *R* sebesar 0,761 hubungan menunjukkan bahwa interval kategori kekuatan hubungan korelasi variable independen yaitu akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman sebesar 0,761 dapat diartikan kekuatan hubungan korelasi kuat.

D. Pembahasan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Dari hasil analisis yang telah dilakukan, maka pembahasan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 21
Hasil pengujian hipotesis

No.	Hipotesis	Hasil	Diterima / Ditolak
H1	Akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.	Nilai signifikan lebih besar dari 5% (0,581 > 0,05)	Ditolak
H2	Transparansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.	Nilai signifikan lebih kecil dari 5% (0,000 < 0,05)	Diterima
H3	Akuntabilitas dan Transparansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.	Nilai signifikan lebih kecil dari 5% (0,002 < 0,05)	Diterima

1. Pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman

Berdasarkan hasil statistic uji t untuk variable akuntabilitas (X1) diperoleh t_{hitung} 0,564 dan t_{tabel} sebesar 1,745, karena $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,564 < 1,745), sedangkan untuk signifikan lebih besar dari 0,05 (0,581 > 0,05). Maka H_0 1.1 diterima dan H_a 1.2 ditolak, artinya bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Hasil pengujian H1 (hipotesis 1) dilakukan dengan menguji secara parsial akuntabilitas keuangan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa. Hipotesis 1 (H1) menyatakan akuntabilitas tidak berpengaruh secara

signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Gerryan Putra (2017) yang menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh signifikan tersebut. Hal ini disebabkan karena berbagai hal yaitu belum maksimalnya pemanfaatan suatu akuntansi dan anggaran yang dapat menjamin bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara konsisten sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pengeluaran keuangan nagari yang dilakukan belum berorientasi pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan hasil (manfaat) yang akan di capai.

2. Pengaruh transparansi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Berdasarkan hasil statistic uji t untuk variable transparansi (X2) diperoleh t_{hitung} sebesar 4,442 dan t_{tabel} sebesar 1,745, karena $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,442 > 1,745$), sedangkan untuk signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Maka H_0 2.1 ditolak dan H_a 2.2 diterima, artinya bahwa transparansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Perangkat Nagari yang memiliki minat akan suatu informasi yang diperoleh melalui transparansi keuangan akan mengatakan bahwa transparansi keuangan sangat dibutuhkan untuk dilakukan. Mengenai berbagai hal yang diperoleh mengenai informasi keuangan bisa di akses melalui media-media yang mudah diperolehnya sebuah informasi. Kebutuhan dan minat yang kuat akan suatu informasi akan menjadikan sesuatu yang memiliki kendala dapat diukur letak permasalahannya. Namun terlihat secara realitanya bahwa sebagian perangkat nagari tidak menginginkan adanya transparansi keuangan desa lebih modern lagi, selain hanya sebatas baliho yang terpajang di depan kantor. Terbatasnya akses dalam memperoleh

informasi menjadi kendala dari beberapa pihak yang paham dengan teknologi namun terbatas informasi. Akses yang terbatas tersebut tidak diperbarui dengan media yang lebih baik dan lebih bisa digunakan, hal ini disebabkan karena tidak semua pihak menyetujui hal tersebut. Sehingga kemungkinan besar untuk perolehan aksesibilitas keuangan desa yang dilakukan secara media massa atau elektronik akan terkendala untuk dilaksanakan.

3. Pengaruh akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Hasil penelitian mendukung hipotesis ketiga. Berdasarkan data sebelumnya hasil pengujian diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 10,322 dan F_{tabel} sebesar 3,63 dimana $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($10,322 > 3,63$) dengan signifikan lebih kecil dari 0,05 ($0,002 < 0,05$). maka H_0 3.1 ditolak dan H_a 3.2 diterima. Maka dapat diartikan bahwa akuntabilitas dan transparansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Efektivitasnya sebuah organisasi dalam pencapaian sebuah hasil yang diperoleh terlihat jika semakin minimnya pengeluaran yang dilakukan atas besarnya pencapaian yang diperoleh. Efektivitasnya terlihat ketika *output* yang dikeluarkan dapat di minimalisir lebih kecil atas pencapaian *outcome* yang lebih besar. Peran akuntabilitas dan transparansilah yang memudahkan bagi penerima informasi dalam melihat hasil yang telah diperoleh. Akuntabilitas keuangan yang transparan dapat memudahkan pengguna informasi dalam melihat kinerja perangkat nagari. Sehingga pengukuran atas pencapaian yang telah dilakukan dapat tergambarkan dengan jelas besarnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis mengenai “pengaruh akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap efektifitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil hipotesis pertama menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
2. Hasil hipotesis kedua menyatakan bahwa transparansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.
3. Hasil hipotesis ketiga menyatakan bahwa akuntabilitas dan Transparansi keuangan berpengaruh signifikan terhadap efektifitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

B. Implikasi

Setelah dilakukan penelitian terkait pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap efektifitas pengelolaan alokasi dana desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, diketahui bahwa implikasinya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh akuntabilitas keuangan terhadap efektifitas pengelolaan alokasi dana desa tidak berpengaruh signifikan atau dikatakan lemah. Walaupun demikian akuntabilitas keuangan memiliki peran penting dalam mewujudkan efektifitas dana desa. Dari segi internalnya akuntabilitas keuangan sangat membantu pihak-pihak tertentu yang berada di atas seperti camat dan bupati dalam melihat kinerja keuangan pemerintah desa selama kurun waktu tertentu. Jelas saja tanpa adanya akuntabilitas keuangan maka tidak dapat dibaca atau diprediksi hal apa yang perlu di ambil keputusannya untuk dimasa yang akan datang.

2. Selain akuntabilitas keuangan, transparansi keuangan juga memiliki peran penting dalam mewujudkan efektivitas dana desa. Transparansi lebih berperan dalam meningkatkan kinerja keuangan desa di Nagari Lansek Kadok. Melalui transparansi inilah masyarakat dapat melihat besaran output, input serta outcome yang diperoleh dalam kurun waktu satu tahun anggaran. Transparansi yang masih tergolong terbatas aksesnya menjadikan masyarakat kurang produktif dalam memahami keuangan desa. Untuk mempertajam pemahaman masyarakat dalam memperoleh informasi keuangan desa alangkah baiknya jika desa memberikan akses informasi yang lebih. Aksesibilitas yang diperoleh tidak hanya berupa baliho yang terpajang di depan kantor, melainkan di beberapa tempat yang dapat dilihat dan sering dilewati oleh masyarakat desa.
3. Akuntabilitas dan transparansi keuangan desa merupakan factor yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa. Pengaruh akuntabilitas dan transparansi keuangan terhadap efektivitas pengelolaan dana desa adalah sebesar 0,761 yang menyatakan bahwa korelasi sangat kuat. Hal ini menyatakan bahwa akuntabilitas keuangan didukung dengan transparansi keuangan dalam mewujudkan efektivitas keuangan desa. Pemahaman masyarakat mengenai keuangan desa sangat membantu ketika memperoleh informasi keuangan desa. Ketika masyarakat bisa memperoleh informasi keuangan desa namun tidak paham dengan akuntabilitasnya hal ini tidak menjadikan masyarakat berperan aktif. Namun jika masyarakat memahami akuntabilitas keuangan desa walaupun dengan akses yang terbatas masyarakat ikut akan aktif dalam mewujudkan desa yang produktif.

C. Saran

Dari hasil analisis dan kesimpulan, maka saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meskipun pada variable akuntabilitas pengaruhnya tidak signifikan, namun jika disinergikan dengan transparansi akan berdampak pada efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dalam pencapaian *value for*

money. Oleh karena itu disarankan untuk memperdalam pengetahuan mengenai akuntabilitas keuangan lebih rinci lagi melalui pelatihan-pelatihan yang memadai. Ketidaktahuan dapat dipelajari melalui pelatihan yang mengasah pengetahuan perangkat nagari, serta kemauan perangkat nagari untuk memahami detailnya informasi keuangan dapat membantu berjalannya pengelolaan lebih baik lagi.

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman saja, disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk melakukan penelitian pada daerah yang lebih luas dengan sampel yang lebih besar sehingga hasil yang diperoleh lebih meyakinkan.
3. Variable yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu variable terikat yaitu efektivitas, diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat menambahkan variable-variabel lain seperti persepsi masyarakat dan penggunaan media elektronik seperti aplikasi keudes.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Taufiq. 2011. *Manajemen Strategi: Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Anggota Ikapi. 2011. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. Bandung: FOKUSMEDIA.
- Azwar, Saifuddin. 2019. *Reabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Anggota IKAPI (Pustaka Belajar).
- Ekasari, Ratna. 2020. *Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi*. Malang: AE Publishing.
- Janie, D. N. 2012. *Statistik Deskriptif dan Regresi Linear Berganda dengan SPSS*. Semarang University Press: Semarang.
- Karianga, Hendra. 2017. *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah*. Depok: Kencana.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Mehta, Cyrus & Panel, Nitin. 2013. *IBM SPSS Exact Tests*. Springer: E Book.
- Nawawi, Zaidan. 2015. *Manajemen Pemerintah*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Neolaka, Armos. 2014. *Metode Penelitian dan Statistik*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraheni, Eviniar & Adi, P. H. 2018. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Meta-Analisis*. Samarinda: Simposium Nasional Akuntansi.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 8 Tahun 2007 *tentang Pemerintahan Nagari*.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 *tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 *tentang Dana Perimbangan*.
- Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, Dyah Ratih. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Yogyakarta: Gava Media.

- Saraswati, Erwin. 2018. *Efisiensi dan Efektivitas Manajemen Keuangan Desa*. Simposium Nasional Keuangan Negara.
- Sofyani, Hafiez & Tahar, Afrizal. Peran Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Indonesia terhadap Kepercayaan Masyarakat Desa: Kasus di Kabupaten Bantul. *Jurnal Akademi Akuntansi Vol 4 No 1*. ISSN: 2654-8321.
- Standar Akuntansi Pemerintahan. 2011. Jakarta: Redaksi Sinar Grafika.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Statistik untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2020. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, tesis, dan Disertasi*. Alfabeta CV. Bandung.
- Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa-Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Jakarta: Pustaka Baru Press.
- Temalagi, Selva & Monica, Fanny A. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal Accounting Research Vol 2 No 1*. ISSN: 2774-6631.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 *tentang Keterbukaan Informasi Publik*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*.

LAMPIRAN

Lampiran : Kuesioner Penelitian

KUESIONER PENELITIAN

Kepada Yth:
Bapak/Ibu/Sdr/I Pemerintah Desa Nagari Lansek Kadok
Di Tempat

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lara Aryanti
NIM : 1730403047
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri Batusangkar

Memohon kesediaan dari Bapak/Ibu/Sdr/I untuk kiranya dapat berpartisipasi dalam mengisi kuesioner penelitian ini, berkaitan dengan penyusunan skripsi yang saya lakukan dalam rangka menyelesaikan program studi Akuntansi Syariah S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pemerintah desa. Oleh karena itu mohon kesediaannya untuk mengisi/menjawab kuesioner ini dengan sejujur-jujurnya. **Kuesioner ini hanya untuk kepentingan skripsi tidak untuk dipublikasikan, dan kerahasiaan data yang diisi akan tetap di jaga.**

Atas kerjasama yang baik dan kesungguhan Bapak/Ibu/Sdr/I dalam mengisi kuesioner ini, saya ucapkan terima kasih.

Batusangkar, November 2021
Hormat Saya,

Lara Aryanti
NIM 1730403047

KUESIONER PENELITIAN

Identitas Responden

1. Nama :
(Boleh tidak diisi)
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia : Tahun
4. Tingkat Pendidikan : SMA/SMK D3
 S1 S2
Lain-lain
5. Jabatan :
6. Pengalaman Kerja : Tahun
7. Nama Desa :

Petunjuk Pengisian

Pilihlah jawaban dibawah ini dengan memberi tanda *checklist* (✓) pada salah satu jawaban yang paling mendekati pendapat anda

- Penilaian:**
- SS = Sangat Setuju
 - S = Setuju
 - KS = Kurang Setuju
 - TS = Tidak Setuju
 - STS = Sangat Tidak Setuju

2. AKUNTABILITAS

NO	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1.	Banyak transaksi berkenaan dengan penggunaan uang desa tidak disertai bukti transaksi yang sah (terotorisasi).					
2.	Format pelaporan keuangan pemerintahan desa di tempat saya bekerja tidak sesuai dengan standar yang ditentukan oleh aturan yang berlaku.					
3.	Beberapa kegiatan yang dilakukan pemerintahan desa di tempat saya bekerja tidak sesuai dengan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang ditetapkan.					
4.	Laporan keuangan yang kami hasilkan telah disajikan secara jujur dan wajar					
5.	Laporan keuangan yang disusun pemerintahan desa di tempat saya bekerja dibuat secara lengkap.					
6.	Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan bebas dari kesalahan yang bersifat material					
7.	Penyelesaian laporan keuangan pemerintahan desa di tempat saya bekerja selalu tepat waktu.					
8.	Laporan keuangan desa disajikan secara konsisten					
9.	Pembuatan RKP-Desa memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan keluaran					
10.	Pelaksanaan belanja desa didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai peraturan perundang-undangan.					

Sumber: Selfa & Fanny, (2021: 64)

3. TRANSPARANSI

NO	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1.	Terdapat <i>hardwhare</i> (computer) yang mendukung penyusunan laporan keuangan desa					
2.	Menggunakan aplikasi (<i>software</i>) dari pemerintah guna mendukung penyusunan laporan keuangan					
3.	Laporan keuangan desa dipublikasi secara					

	terbuka melalui media massa					
4.	Pemerintah desa saya secara berkala melaporkan informasi tentang capaian prestasi desa yang telah diraih baik melalui media baliho kantor desa, rapat (pertemuan) desa, atau website pemerintah desa.					
5.	Menyajikan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan.					

Sumber: Hafiez & Afrizal, (2021: 21)

4. Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

NO	PERNYATAAN	SS	S	KS	TS	STS
1.	Pemerintah daerah telah menggunakan system SKO (Sasaran Kerja Organisasi) per kuartal					
2.	Unit kerja telah menggunakan SKO untuk tujuan pembayaran SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Standar Kelayakan Minimal)					
3.	Tidak ada unit kerja yang melebihi anggaran dalam mengajukan revisi anggaran					
4.	Struktur organisasi pengelolaan keuangan daerah PKD (Pengawas Kelurahan dan Desa) telah sesuai dengan format BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah).					
5.	Kinerja staff telah dimonitor dengan menggunakan indicator yang sangat terukur					
6.	Mekanisme insentif dan sanksi untuk staff telah dilembagakan secara memadai					

Sumber: Erwin, (2018: 1039).

****Terimakasih****

DATA TABULASI JAWABAN RESPONDEN

NAMA	JABATAN	AKUNTABILITAS (X1)										Total X1	TRANSPARANSI (X2)					Total X2	EFEKTIVITAS (Y)						Total Y
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5		Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	
Antoni	Wali Nagari	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	20	5	5	4	5	5	4	28
Idris Rois	Sekretaris Nagari	4	4	4	4	4	2	4	4	5	5	40	5	5	4	4	4	22	4	4	4	4	4	4	24
Refa Liyanti	Kaur Pemerintahan	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	46	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
Kaironi	Kasi Kesejahteraan	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39	4	4	4	3	4	19	4	4	3	4	3	4	22
Asri	Kasi Pelayanan	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	36	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	3	3	22
Nelpi Adriati	Staf Kasi Pemerintahan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	4	23
Ahmad Khamil	Staf Kasi Kesejahteraan	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	46	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
Gilda Andeva	Kaur TU dan Umum	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	5	5	5	4	4	23	4	4	5	4	5	5	27
Yenita	Kaur Keuangan	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	43	5	5	5	4	4	23	4	4	5	4	5	5	27
Zarminto	Kaur Perencanaan	5	3	3	4	4	3	4	4	4	4	38	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
Andi	Staf TU dan Umum	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	46	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
Novianti	Staf Kaur Keuangan	4	5	4	5	5	4	4	5	4	4	44	5	4	2	4	4	19	4	4	4	4	4	4	24
Hirwan	Staf Kaur Keuangan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	41	5	5	5	4	4	23	4	4	5	4	5	5	27
Israil	Kpl Jr 1 Ls Kodok	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	37	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
Lisman	Kpl Jr 2 Kt Panjang	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	40	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
Efrizal	Kpl Jr 3 Rambah	3	3	3	4	4	4	3	4	4	4	36	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	3	3	22
Eri	Kpl Jr 4 Beringin	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	39	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	4	24
Kasan	Kpl Jr 5 Kotonopan Seti	5	3	3	4	4	2	4	4	4	4	37	4	5	5	4	4	22	4	4	4	5	5	5	27

UJI VALIDITAS AKUNTABILITAS

Correlations

		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X1.9	X1.10	X1.11	X1.12	Akuntabilitas
X1.1	Pearson Correlation	1	.493*	.543*	-.060	-.060	-.041	.041	-.277	.598**	.520*	.520*	.418	.591**
	Sig. (2-tailed)		.038	.020	.814	.814	.872	.872	.266	.009	.027	.027	.084	.010
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
X1.2	Pearson Correlation	.493*	1	.946**	.279	.279	.019	-.019	.303	.474*	.800**	.611**	.557*	.917**
	Sig. (2-tailed)	.038		.000	.263	.263	.940	.940	.221	.047	.000	.007	.016	.000
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
X1.3	Pearson Correlation	.543*	.946**	1	.060	.060	.041	-.041	.277	.478*	.700**	.700**	.657**	.893**
	Sig. (2-tailed)	.020	.000		.814	.814	.872	.872	.266	.045	.001	.001	.003	.000
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
X1.4	Pearson Correlation	-.060	.279	.060	1	1.000**	.686**	.086	.203	.125	.236	-.189	.125	.381
	Sig. (2-tailed)	.814	.263	.814		.000	.002	.735	.420	.621	.345	.453	.621	.119
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
X1.5	Pearson Correlation	-.060	.279	.060	1.000**	1	.686**	.086	.203	.125	.236	-.189	.125	.381
	Sig. (2-tailed)	.814	.263	.814	.000		.002	.735	.420	.621	.345	.453	.621	.119
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
X1.6	Pearson Correlation	-.041	.019	.041	.686**	.686**	1	.059	.139	.086	-.130	-.130	.343	.261
	Sig. (2-tailed)	.872	.940	.872	.002	.002		.817	.582	.735	.608	.608	.163	.295
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
X1.7	Pearson Correlation	.041	-.019	-.041	.086	.086	.059	1	.219	-.086	.130	.130	.171	.179

	Sig. (2-tailed)	.872	.940	.872	.735	.735	.817		.384	.735	.608	.608	.496	.476
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
X1.8	Pearson Correlation	-.277	.303	.277	.203	.203	.139	.219	1	-.203	.307	-.088	.058	.350
	Sig. (2-tailed)	.266	.221	.266	.420	.420	.582	.384		.420	.216	.730	.819	.155
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
X1.9	Pearson Correlation	.598**	.474*	.478*	.125	.125	.086	-.086	-.203	1	.189	.189	.250	.476*
	Sig. (2-tailed)	.009	.047	.045	.621	.621	.735	.735	.420		.453	.453	.317	.046
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
X1.10	Pearson Correlation	.520*	.800**	.700**	.236	.236	-.130	.130	.307	.189	1	.679**	.472*	.818**
	Sig. (2-tailed)	.027	.000	.001	.345	.345	.608	.608	.216	.453		.002	.048	.000
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
X1.11	Pearson Correlation	.520*	.611**	.700**	-.189	-.189	-.130	.130	-.088	.189	.679**	1	.756**	.656**
	Sig. (2-tailed)	.027	.007	.001	.453	.453	.608	.608	.730	.453	.002		.000	.003
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
X1.12	Pearson Correlation	.418	.557*	.657**	.125	.125	.343	.171	.058	.250	.472*	.756**	1	.725**
	Sig. (2-tailed)	.084	.016	.003	.621	.621	.163	.496	.819	.317	.048	.000		.001
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Akuntabilitas	Pearson Correlation	.591**	.917**	.893**	.381	.381	.261	.179	.350	.476*	.818**	.656**	.725**	1
	Sig. (2-tailed)	.010	.000	.000	.119	.119	.295	.476	.155	.046	.000	.003	.001	
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

X2.7	Pearson Correlation	-.150	-.150	-.041	-.728**	-.067	1.000**	1	.059	-.108	.086	.010
	Sig. (2-tailed)	.551	.551	.872	.001	.791	.000		.817	.668	.735	.970
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
X2.8	Pearson Correlation	.150	.150	.041	.000	.067	.059	.059	1	.108	-.086	.338
	Sig. (2-tailed)	.551	.551	.872	1.000	.791	.817	.817		.668	.735	.169
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
X2.9	Pearson Correlation	-.277	-.277	-.076	.000	.372	-.108	-.108	.108	1	.158	.232
	Sig. (2-tailed)	.265	.265	.766	1.000	.128	.668	.668	.668		.531	.355
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
X2.10	Pearson Correlation	.219	.219	.060	.000	.098	.086	.086	-.086	.158	1	.493*
	Sig. (2-tailed)	.382	.382	.814	1.000	.699	.735	.735	.735	.531		.037
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Transparansi	Pearson Correlation	.470*	.737**	.613**	.120	.144	.010	.010	.338	.232	.493*	1
	Sig. (2-tailed)	.049	.000	.007	.636	.569	.970	.970	.169	.355	.037	
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Y7	Pearson Correlation	.325	.325	-.474*	.669**	-.184	.474*	1	.819**	.895**
	Sig. (2-tailed)	.188	.188	.047	.002	.465	.047		.000	.000
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Y8	Pearson Correlation	-.048	-.048	-.555*	.595**	-.216	.243	.819**	1	.698**
	Sig. (2-tailed)	.851	.851	.017	.009	.390	.332	.000		.001
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Efektivitas	Pearson Correlation	.513*	.513*	-.136	.443	.185	.748**	.895**	.698**	1
	Sig. (2-tailed)	.029	.029	.590	.065	.462	.000	.000	.001	
	N	18	18	18	18	18	18	18	18	18

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

UJI REABILITAS AKUNTABILITAS

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	18	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	18	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.823	10

UJI REABILITAS TRANSPARANSI

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	18	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	18	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.608	5

UJI REABILITAS EFEKTIVITAS

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	18	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	18	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.760	6

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Efektivitas	24.50	1.886	18
Akuntabilitas	40.44	3.312	18
Transparansi	20.50	1.425	18

Correlations

		Efektivitas	Akuntabilitas	Transparansi
Pearson Correlation	Efektivitas	1.000	.160	.755
	Akuntabilitas	.160	1.000	.087
	Transparansi	.755	.087	1.000
Sig. (1-tailed)	Efektivitas	.	.263	.000
	Akuntabilitas	.263	.	.365
	Transparansi	.000	.365	.
N	Efektivitas	18	18	18
	Akuntabilitas	18	18	18
	Transparansi	18	18	18

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Transparansi, Akuntabilitas ^b		Enter

a. Dependent Variable: Efektivitas

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.761 ^a	.579	.523	1.303	1.741

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

b. Dependent Variable: Efektivitas

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	35.040	2	17.520	10.322	.002 ^b
	Residual	25.460	15	1.697		
	Total	60.500	17			

a. Dependent Variable: Efektivitas

b. Predictors: (Constant), Transparansi, Akuntabilitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	2.039	5.731		.356	.727		
	Akuntabilitas	.054	.096	.095	.564	.581	.992	1.008
	Transparansi	.989	.223	.747	4.442	.000	.992	1.008

a. Dependent Variable: Efektivitas

Collinearity Diagnostics^a

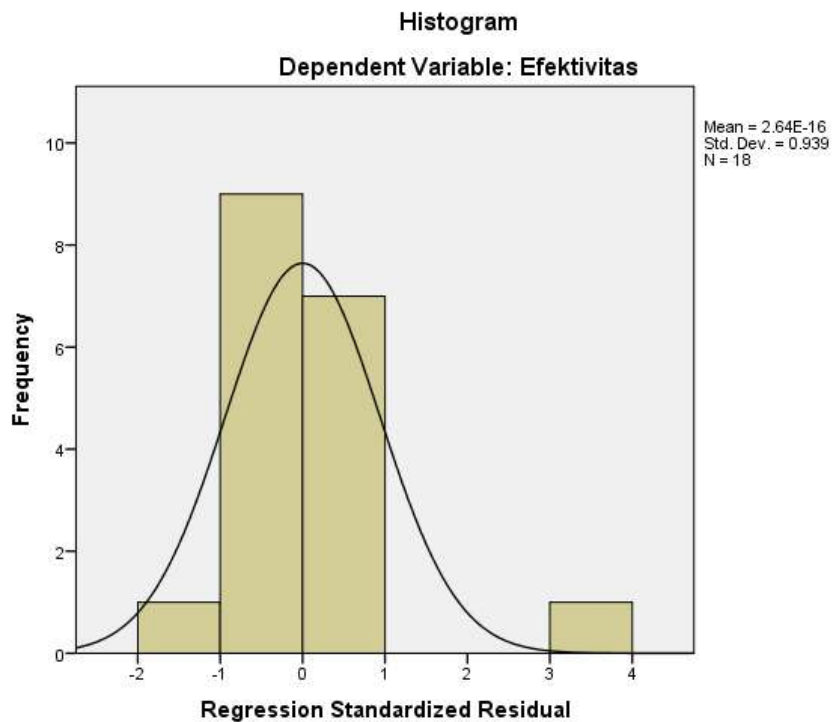
Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Akuntabilitas	Transparansi
1	1	2.993	1.000	.00	.00	.00
	2	.005	24.384	.01	.72	.36
	3	.002	39.883	.99	.27	.64

a. Dependent Variable: Efektivitas

Residuals Statistics^a

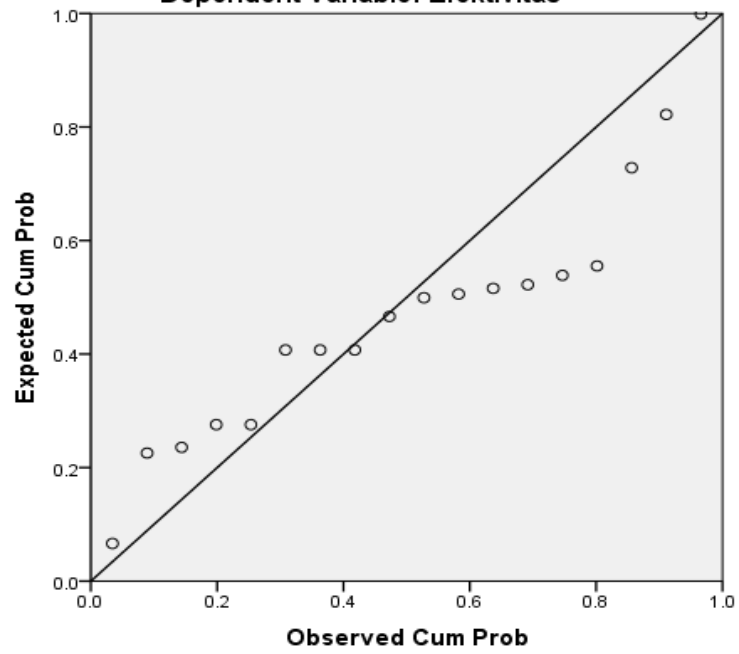
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	22.78	27.11	24.50	1.436	18
Std. Predicted Value	-1.201	1.818	.000	1.000	18
Standard Error of Predicted Value	.328	.664	.517	.126	18
Adjusted Predicted Value	22.99	27.15	24.52	1.423	18
Residual	-1.960	4.019	.000	1.224	18
Std. Residual	-1.504	3.085	.000	.939	18
Stud. Residual	-1.607	3.187	-.008	.989	18
Deleted Residual	-2.236	4.291	-.022	1.359	18
Stud. Deleted Residual	-1.706	5.420	.114	1.452	18
Mahal. Distance	.134	3.465	1.889	1.247	18
Cook's Distance	.000	.229	.035	.059	18
Centered Leverage Value	.008	.204	.111	.073	18

a. Dependent Variable: Efektivitas



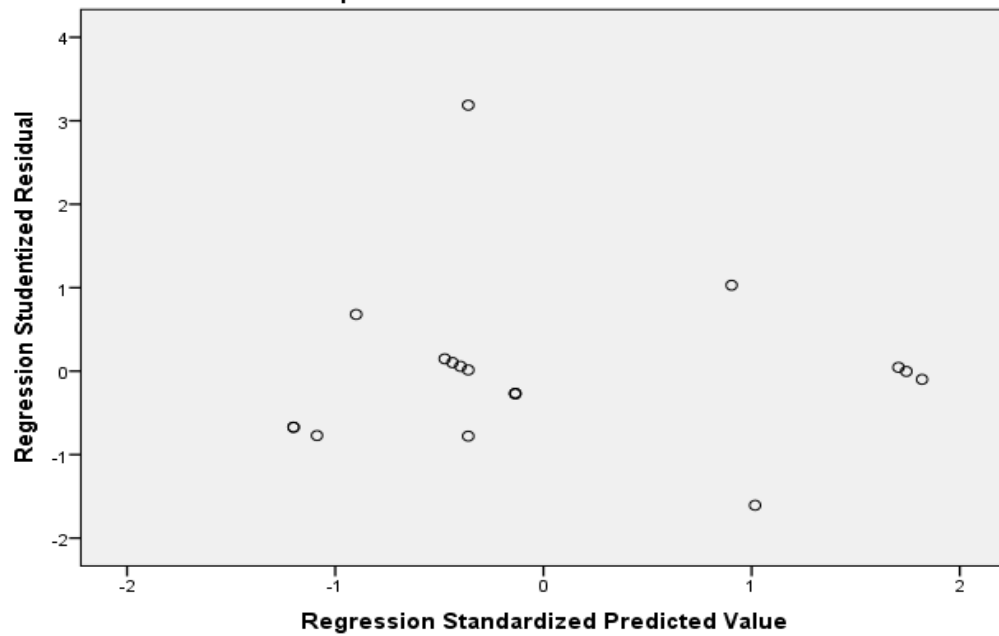
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Efektivitas



Scatterplot

Dependent Variable: Efektivitas



One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			18
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.22377262
Most Extreme Differences	Absolute		.275
	Positive		.275
	Negative		-.156
Test Statistic			.275
Asymp. Sig. (2-tailed)			.001 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		.111 ^d
		99% Confidence Interval	
		Lower Bound	.103
		Upper Bound	.119

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. Based on 10000 sampled tables with starting seed 2000000.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar 27213, Telp. (0752) 71150, Ext 135, Fax. (0752) 71879
Website: www.iainbatusangkar.ac.id e-mail: lppm@iainbatusangkar.ac.id

Nomor : B- 0867/In.27/L.I/TL.00/11/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Rangkap
Perihal : **Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian**

01 November 2021

Yth. Bupati Pasaman
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman
Di
Lubuk Sikaping

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Dengan ini disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa yang tersebut di bawah ini:

Nama/NIM : Lara Aryanti / 1730403047
Tempat/Tanggal Lahir : Lansap Kadat, 20 Februari 1999
Kartu Identitas : KTP: 1308196002990001
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Akuntansi Syariah
Alamat : Rambah Jorong III Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan
Kabupaten Pasaman

akan melakukan pengumpulan data untuk proses Penulisan Laporan Hasil Penelitiannya sebagai berikut:

Judul Penelitian : **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman**
Lokasi : Nagari Lansek Kadok
Waktu : 02 November 2021 s.d 02 Januari 2022
Dosen Pembimbing 1 : Nasfizar Guspendri, SE., M.Si
2 : -

untuk itu, diharapkan kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan surat izin penelitian mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Dr. H. Muhammad Fazlis, M. Pd

Tembusan

1. Rektor IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Batusangkar (Sebagai Laporan)



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ahmad Yani No.34, Panah, LubukSikaping, KabupatenPasaman, Sumatera Barat
Telp. (0753) 20090, Fax. (0753) 20090
email: dpmptspasaman@gmail.com web : <https://dpmptsp.pasamankab.go.id>

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
No : 315/DPMPTSP/XI/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman, Setelah mempelajari Surat Ketua LPPM Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, Perihal: Mohon Penerbitan Surat Izin Penelitian, Nomor : B-0867/In.27/L.I/TL.00/11/2021, Tanggal 1 November 2021 dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Lara Aryanti
No. BP : 1730403047
Program Studi : Akutansi Syariah
Jenjang : S1
Alamat : Jl. Sudirman No. 137 Kuburajo Lima Kaum Batusangkar

Akan melaksanakan kegiatan Penelitian Pada :

Lokasi : Nagari Lansek Kadok
Waktu : 05 November 2021 s/d Januari 2022
Dalam Rangka : Pengumpulan Data
Judul Penelitian : Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak boleh menyimpang dari topik dan tujuan penelitian
2. Dalam melakukan penelitian, yang bersangkutan hendaklah menunjukkan surat-surat keterangan yang bertubungan dengan itu, serta melaporkan diri sebelum dan sesudah penelitian kepada pemerintah setempat.
3. Mematuhi semua peraturan yang berlaku dan menghormati adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
4. Bila terjadi penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut di atas, maka surat keterangan ini akan dicabut kembali.
5. Mengirimkan hasil penelitian kepada Bupati Pasaman Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasaman

Demikianlah Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Sikaping
Pada tanggal : 5 November 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PASAMAN

Dra. YUSNIMAR, Apt
NIP. 19650606 199303 2 006

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pasaman (sebagai Inpres)
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Pasaman
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pasaman
4. Camat Rao Selatan
5. Wali Nagari Lansek Kadok
6. Ketua LPPM Institut Agama Islam Negeri Batusangkar



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN RAO SELATAN
NAGARI LANSEK KADOK**

Jln. Lansek Kadok No . 69

Kode POS. 26353

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN

Nomor : 140 / 147 / SKIP / NLK -2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Menerangkan bahwa :

Nama : LARA ARYANTI
No.BP : 1730403047
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam
Lokasi Penelitian : Nagari Lansek Kadok

Dengan ini memberikan Izin kepada Nama yang tersebut diatas melakukan Penelitian di Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan dalam rangka Penulisan Skripsi Yang Berjudul "*Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Nagari Lansek Kadok Kecamatan rao selatan*"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Nagari Lansek Kadok
Pada Tanggal : 08 November 2021



ANTONI.S.S.Pd



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BATUSANGKAR
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Sudirman No. 137 Lima Kaum Batusangkar Telp. (0752) 71150, 574221, 71890 Fax. (0752) 71879
Website : www.iainbatusangkar.ac.id e-mail : info@iainbatusangkar.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : 1047.L./In.27/F.IV.1/PP.00.9/11 / 2021

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan ini menugaskan Saudara:

Nama Dosen / NIP	Pangkat / Gol	Jabatan	Keterangan
Nasfizar Guspendri, SE., M.Si. 197508232003121004	Penata Tk.1 / III.d	Lektor	Pembimbing

sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam , atas nama :

Nama : Lara Aryanti
NIM : 1730403047
Jurusan : Akuntansi Syariah
Judul Proposal : *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Efektivitas Pengeblaan Alokasi Dana Desa di Nagari Lansek Kadok Kec. Rao Selatan Kab.Pasaman.*

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 29 November 2021
a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan


Dr. Nofrivul, SE., MM

Turnitin Lara Aryanti

ORIGINALITY REPORT

35%
SIMILARITY INDEX

35%
INTERNET SOURCES

13%
PUBLICATIONS

20%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ecampus.iainbatusangkar.ac.id <small>Internet Source</small>	9%
2	repository.uksw.edu <small>Internet Source</small>	5%
3	blogbermanfaat-nez.blogspot.com <small>Internet Source</small>	4%
4	ecampus.imds.ac.id <small>Internet Source</small>	2%
5	Submitted to Institut Pemerintahan Dalam Negeri <small>Student Paper</small>	2%
6	eprints.iain-surakarta.ac.id <small>Internet Source</small>	2%
7	www.researchgate.net <small>Internet Source</small>	1%
8	repositori.uin-alauddin.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
9	p2tanrasumbar.blogspot.com <small>Internet Source</small>	1%

10	repository.uin-suska.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
11	123dok.com <small>Internet Source</small>	1%
12	akurasi.unram.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
13	vdocuments.site <small>Internet Source</small>	1%
14	eprints.ipdn.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
15	plus.google.com <small>Internet Source</small>	1%
16	core.ac.uk <small>Internet Source</small>	1%
17	journal.stiepasim.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
18	repository.upi.edu <small>Internet Source</small>	1%
19	digilib.uinsby.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
20	Submitted to Southeast Community College <small>Student Paper</small>	1%
21	digilib.uns.ac.id <small>Internet Source</small>	1%

Exclude quotes OFF
Exclude bibliography ON

Exclude matches 1%